



**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 1 TAHUN 2011**

**TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KOTA PEKANBARU TAHUN 2005 – 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Pekanbaru memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan, serta Pusat Kebudayaan Melayu untuk menuju masyarakat sejahtera berlandaskan iman dan taqwa yang di amanatkan oleh Visi Kota Pekanbaru 2025 ;
  - b. bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pekanbaru 2005 – 2025.

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Pengertian RPJP Kota .....	2
1.3. Proses Penyusunan RPJP Kota Pekanbaru .....	2
1.4. Maksud dan Tujuan .....	3
1.5. Landasan Hukum .....	4
1.6. Hukungan RPJP Kota Pekanbaru dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ..	5
1.7. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II KONDISI DAN ANALISIS KONDISI UMUM DAERAH</b> .....	<b>8</b>
2.1. Kondisi Umum Daerah .....	8
2.1.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup .....	8
2.1.2. Demografi .....	13
2.1.3. Prekonomian dan Sumber Daya Alam .....	15
2.1.4. Sosial, Budaya dan Politik .....	22
2.1.5. Sarana dan Prasarana .....	28
2.1.6. Pemerintahan .....	32
2.1.7. Pendidikan .....	34
2.1.8. Hukum dan Kamtibmas .....	36
2.1.9. Kehidupan Beragama .....	37
2.2. Analisis Kondisi Umum Kota Pekanbaru .....	38
2.2.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup .....	38
2.2.2. Demografi .....	39
2.2.3. Prekonomian dan Sumber Daya Alam .....	41
2.2.4. Sosial, Budaya dan Politik .....	44
2.2.5. Sarana dan Prasarana .....	47
2.2.6. Pemerintahan .....	51
2.2.7. Pendidikan .....	52
2.2.8. Hukum dan Kamtibmas .....	54
2.2.9. Kehidupan Beragama .....	55

**BAB III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN KOTA PEKANBARU**

**TAHUN 2005-2025 ..... 57**

3.1. Visi ..... 57

3.2. Misi ..... 59

3.3. Arah Pembangunan Jangka Panjang Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025 .... 59

    3.3.1. Sasaran Pokok ..... 59

    3.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pekanbaru ..... 64

**BAB IV PENUTUP ..... 78**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang.

Dengan rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Kota Pekanbaru terus berkembang hingga hari ini. Dimulai dari sebuah dusun yang bernama Payung Sekaki yang terletak di tepi Sungai Siak, lalu berkembang menjadi sebuah pasar (pekan) di Senapelan, hingga berganti nama menjadi Pekanbaru sejak tahun 1784. Tahun 1919 Pekanbaru menjadi tempat kedudukan *controluer* Pemerintah Belanda. Di zaman Jepang, Pekanbaru menjadi *Gun* yang dipakai oleh *Gun Cho* dan tempat kedudukan Riau *Syutjoukang*. Di zaman pemerintahan Republik Indonesia, Pekanbaru menjadi :

- Haminte Pekanbaru dan merupakan ibukota Keresidenan Riau berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan No. 103 tanggal 17 Mei Tahun 1946.
- Kota Kecil berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1956.
- Kota Praja berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957.
- Kotamadya berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1974.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari 62,96 km<sup>2</sup> menjadi 446,50 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan/desa. Dari hasil pengukuran di lapangan oleh BPN Tk.I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 km<sup>2</sup>. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kelurahan/desa baru dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Nomor 55 tahun 1999 tanggal 21 Oktober 1999 menjadi 50 Kelurahan. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2003 menetapkan pembentukan kecamatan baru dari 8 kecamatan menjadi 12 kecamatan. Dan pembentukan kelurahan baru dari 50 kelurahan menjadi 58 kelurahan. Sejarah panjang Kota Pekanbaru ini turut menjadi pertimbangan dalam perencanaan jangka panjang Pekanbaru.

## **1.2 Pengertian RPJP Kota.**

Mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah untuk priode 20 (dua puluh) tahun kedepan, mulai tahun 2005 hingga tahun 2025. RPJPD Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025 berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru untuk 5 (lima) tahunan. RPJPD bersifat makro yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah Kota Pekanbaru, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan.

## **1.3 Proses Penyusunan RPJPD Kota Pekanbaru.**

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru tahun 2005-2025 memperhatikan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah, yakni :

1. RPJP Daerah Provinsi mengacu pada RPJP Nasional ;
2. RPJP Daerah Kabupaten/Kota mengacu pada RPJP Daerah Provinsi ;
3. Memperhatikan Seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang RPJP Daerah ;
4. Apabila RPJP diatasnya belum tersedia, maka penyusunan RPJP Daerah Kota dan atau RPJP Daerah Kabupaten/Kota dilakukan secara simultan dan terkoordinasi.

Dalam upaya mengantisipasi arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, maka penyusunan RPJP Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025 dilaksanakan melalui tata cara dan proses sebagai berikut :

1. Penyiapan rancangan RPJP Kota Pekanbaru guna memperoleh gambaran awal visi, misi dan arah pembangunan daerah ;
2. Musrenbang Jangka Panjang Daerah yang dilaksanakan guna memperoleh masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terhadap rancangan RPJP Kota Pekanbaru ;
3. Seluruh masukan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah menjadi masukan utama penyempurnaan rancangan RPJP Kota Pekanbaru hingga menjadi Rencana Akhir RPJP Kota ;
4. Penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJP Kota, dibawah koordinasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum ;
5. Rancangan akhir RPJP Kota Pekanbaru beserta lampirannya disampaikan kepada DPRD sebagai inisiatif Pemerintah Daerah guna diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025.

#### **1.4 Maksud dan Tujuan.**

Dalam menyusun RPJP Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025 dimaksudkan sebagai acuan daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Kota Pekanbaru.

Tujuan penyusunan RPJP Kota Pekanbaru tahun 2005-2025 adalah untuk melaksanakan komitmen pada pemangku kepentingan pembangunan.

## 1.5 Landasan Hukum.

Landasan hukum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekanbaru tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Kota Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19) ;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
7. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran negara Indonesia Nomor 4725) ;

8. Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Madya Pekanbaru Tahun 1994 Nomor 3 seri D Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 13).

## **1.6 Hubungan RPJP Kota Pekanbaru 2005-2025 Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025 merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk priode 20 (dua puluh) tahun yang dalam



penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau Tahun 2005-2025, RPJP Kota Pekanbaru akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pekanbaru untuk priode 5 (lima) tahunan.

Penyusunan RPJM Kota Pekanbaru berpodoman kepada RPJP Kota Pekanbaru dengan mempertimbangkan RPJM Provinsi Riau. Selanjutnya Perencanaan Tahunan sebagai penjabaran dari RPJM Kota Pekanbaru akan diawali oleh penyusunan Draft Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) sebagai salah satu bahan dalam Musrenbang Kota Pekanbaru untuk kemudian disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD).

Tahapan selanjutnya adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) secara simultan untuk disepakati pihak eksekutif dan legislatif sebagai pengejawantahan RKPD.

## **1.7 Sistematika Penulisan.**

Sistematika Penulisan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pekanbaru Tahun 2005–2025 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Pendahuluan.
- 1.2. Pengertian RPJP Kota.
- 1.3. Proses Penyusunan RPJP Kota Pekanbaru.
- 1.4. Maksud dan Tujuan.
- 1.5. Landasan Hukum.
- 1.6. Hubungan RPJPD Kota Pekanbaru dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.
- 1.7. Sistematika Penulisan

## BAB II KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

- 2.1. Kondisi Umum Daerah.
- 2.2. Analisis Kondisi Umum Daerah

## BAB III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN

- 3.1. Visi
- 3.2. Misi
- 3.3. Arah Pembangunan Daerah

## BAB IV PENUTUP

## BAB II

# KONDISI DAN ANALISIS KONDISI UMUM DAERAH

### 2.1. Kondisi Umum Daerah.

Pembangunan Kota Pekanbaru yang telah dilaksanakan selama ini menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang meliputi bidang geomorfologi dan lingkungan hidup, demografi, perekonomian dan sumber daya alam, sosial budaya dan politik, prasarana dan sarana, pemerintahan, pendidikan, hukum dan kamtibmas, serta kehidupan beragama. Di samping banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan dan masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan dan masih perlu dilanjutkan upaya untuk mengatasinya dalam pembangunan nasional 20 tahun ke depan.

#### 2.1.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup.

1. Kota Pekanbaru secara geografis berada pada posisi  $0^{\circ}25'$  –  $0^{\circ}45'$  Lintang Utara dan  $101^{\circ}14'$  –  $101^{\circ}34'$  Bujur Timur. Sebagaimana wilayah dan kota-kota lain dibagian timur Pulau Sumatera, kondisi geologi lahan Kota pekanbaru terdiri dari endapan *alluvium* muda yang terbentuk akibat pengangkutan dan pengendapan sisa-sisa bahan induk oleh aliran sungai. Lahan jenis ini mempunyai karakteristik yang rentan terhadap gangguan alami maupun pengolahan lahan yang berlebihan. Selain itu sebagian lahan Kota Pekanbaru juga mempunyai ciri *formasi minas* yang karakteristiknya lebih baik namun memiliki kandungan mineral lempung kaolinit yang mempunyai sifat porositas tanah rendah, yang dapat menahan senyawa aluminium, sehingga tanah bersifat asam dan sangat korosif terhadap material logam. Akibat kondisi geologi ini jenis tanah di Kota Pekanbaru bervariasi antara lain *alluvial hidromorf*, *alluvial* coklat kekuningan, *alluvial* kelabu dan tanah-tanah yang berasosiasi, yaitu perpaduan dua jenis tanah yang sulit dibedakan.

2. Pekanbaru terletak di tengah-tengah Propinsi Riau dan dikelilingi oleh Kabupaten Kampar, Siak, dan Pelalawan. Pekanbaru berada di tengah-tengah perlintasan jalur darat yang sangat strategis. Posisi Pekanbaru ini menjadi semakin strategis di masa mendatang. Perkembangan yang pesat di Malaysia dan Singapura di satu sisi dan perkembangan pembangunan di Sumatera di sisi lain membuat posisi Pekanbaru sebagai daerah perantara untuk kegiatan perdagangan semakin strategis.
3. Kemiringan lahan Kota Pekanbaru sangat bervariasi, yaitu landai, berombak sampai bergelombang. Sebagian lahan mempunyai permukaan rendah dan berawa, yang tersebar di pinggiran sungai dan beberapa wilayah di dalam kota. Daerah Pekanbaru merupakan daerah dengan frekuensi banjir yang tinggi. Pembangunan di daerah rendah dan berawa yang marak dilakukan dalam sepuluh tahun terakhir menutup jalan air dan mengurangi daerah resapan air. Akibatnya, potensi banjir di daerah rendah dan berawa menjadi semakin besar di masa mendatang.
4. Kota Pekanbaru saat ini memiliki luas 632,26 km<sup>2</sup> dengan penduduk dominan berada di pusat kota. Meskipun demikian, terdapat beberapa pemusatan penduduk di perbatasan kota di luar Pekanbaru yang aktivitas warganya pada siang hari (bekerja, sekolah, dan berbelanja) lebih banyak di Pekanbaru. Daerah Siak Hulu (Kab. Kampar), Minas (Kab.Siak), Sikijang Mati (Kerinci), dan Rimbo Panjang (Kampar) merupakan daerah dengan karakteristik ini. Di masa depan diproyeksikan daerah-daerah ini akan semakin berkaitan erat dan menyatu aktivitasnya dengan Kota Pekanbaru meskipun secara administratif pemerintahan berada di luar kota Pekanbaru.
5. Kondisi geohidrologi Kota Pekanbaru, menunjukkan bahwa potensi air tanah terutama di bagian utara Sungai Siak sangat baik untuk dieksploitasi. Hal ini telah dilakukan oleh PT. Caltex Pacific Indonesia selama puluhan tahun, dengan memanfaatkan potensi air tanah *aquifer* ini untuk kepentingan perusahaan. Potensi geohidrologi ini bisa

dimanfaatkan oleh Kota Pekanbaru sebagai salah satu sumber untuk mencukupi kebutuhan air masyarakat, terutama di bagian utara Kota Pekanbaru.

6. Penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah masih belum berjalan maksimal. Proses pengawasan dalam pemberian IMB dan pembangunan masih harus terus ditingkatkan. Minat masyarakat untuk membangun rumah toko (ruko) masih mendominasi banyak tempat. Konversi lahan pertanian, hutan, dan rawa menjadi kawasan permukiman, perdagangan, dan industri terjadi secara terus menerus. Di beberapa tempat jalur aliran air yang berfungsi sebagai anak sungai dibangun sehingga menyebabkan banjir.
7. Pinggiran Sungai Siak Pekanbaru saat ini sebagian dihuni oleh masyarakat, sebagiannya lagi dimanfaatkan untuk keperluan industri. Pada beberapa ruas terjadi longsor akibat erosi tebing sungai oleh hantaman gelombang. Kondisi ini bisa menjadi lebih parah dalam jangka panjang jika tidak dilakukan usaha untuk menanggulangnya. Pencemaran Sungai Siak Pekanbaru, baik yang disebabkan oleh sampah rumah tangga, maupun oleh industri di sepanjang aliran Sungai Siak Pekanbaru cukup mencemaskan dalam lima tahun terakhir. Salah satu sumber air PDAM Kota Pekanbaru saat ini berasal dari Sungai Siak. Pencemaran Sungai Siak Pekanbaru ini menjadi ancaman bagi lingkungan hidup dan warga jika tidak dikelola dengan baik, apalagi dengan semakin ramainya pemukiman dan industri di sepanjang sungai tersebut. Pengambilan sumber air baku di Sungai Siak Pekanbaru untuk keperluan sumber air PDAM Tirta Siak Pekanbaru perlu dipikirkan alternatifnya, misalnya dengan mengambil sumber air baku dari sungai, danau dan air bawah tanah lainnya.
8. Taman kota, ruang terbuka hijau dan penghijauan di Kota Pekanbaru masih kurang. Dari 26 lokasi taman kota, hanya 3 buah yang berupa taman kota yang dikelola Pemko yang bisa dipakai untuk tempat warga kota bersantai, duduk, berjalan, dan menikmati suasana taman. Inipun masih kurang dimanfaatkan oleh warga. Taman kota lainnya hanya

berbentuk taman di median jalan dan persimpangan jalan sebagai penyejuk mata dan memperindah pemandangan kota. Kekurangan taman kota dan ruang terbuka hijau di tengah-tengah keramaian kota menyebabkan kota Pekanbaru menjadi gersang. Meskipun tahun 2005 terdapat taman kota seluas 16,3 Ha (termasuk median jalan), tetapi tempatnya yang tidak strategis, susah dijangkau, dan tidak terawat. Harga tanah yang semakin mahal membuat masyarakat dan dunia usaha cenderung untuk memanfaatkan tanah yang ada seefektif mungkin dengan mengesampingkan kebutuhan akan perlunya ruang terbuka hijau.

9. Program K3 (Kebersihan, Ketertiban, Keindahan) cukup gencar dilakukan. Pengelolaan kebersihan di tengah kota sudah menampakkan hasil dengan diperolehnya penghargaan Piala Adipura. Meskipun demikian, pengelolaan sampah dan penataan lingkungan di daerah pemukiman dan pinggiran Pekanbaru masih memerlukan perhatian yang lebih besar. Program K3 yang sudah berhasil dilakukan di sekitar pusat kota berpeluang untuk diteruskan keberhasilannya ke wilayah pemukiman yang produksi sampahnya semakin banyak, dan memerlukan penataan K3 yang lebih serius.
10. Pada Tahun 2005 volume sampah yang dibuang ke TPA Muara Fajar perhari adalah 1.171 m<sup>3</sup>, yang dikumpul oleh kecamatan 516 m<sup>3</sup>, LPM Kecamatan 360 m<sup>3</sup>, Dinas Kebersihan dan Pertamanan 265 m<sup>3</sup>, dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 30 m<sup>3</sup>. Dengan jumlah rumah tangga 150.000 di Pekanbaru dan volume sampah perhari untuk masing-masing keluarga diasumsikan 0,015 m<sup>3</sup>, maka volume sampah dari rumah tangga yang terangkut baru sekitar 39%. Masih besarnya jumlah volume sampah yang belum terangkut akan menimbulkan permasalahan. Pembakaran sampah tidak lagi bisa dilakukan di ruang kota karena keterbatasan lahan dan polusi udara yang ditimbulkannya. Selain itu, sampah juga berpeluang untuk diolah menjadi pupuk organik karena 70% merupakan sampah organik, 20% sampah plastik, dan sisanya adalah kaca dan logam. Pemanfaatan

sampah pilihan (kaca, plastik, kertas, dan logam) untuk proses daur ulang menjadi sangat penting di masa depan. Dengan jumlah penduduk sebesar 1.559.472 jiwa pada tahun 2025, maka diperkirakan produksi sampah rumah tangga sebesar 7.074,1 m<sup>3</sup> per hari. Sedangkan sampah domestik sebanyak 30% dari jumlah itu, yaitu sebesar 2.122,2 m<sup>3</sup> per hari.

11. Jumlah kendaraan bermotor di Pekanbaru yang meningkat pesat sejak lima tahun terakhir memperburuk kualitas udara di Kota Pekanbaru akibat gas buangnya. Bau busuk dari pabrik karet yang terletak di sekitar jembatan Siak I dan di daerah Tangkerang cukup mengganggu kenyamanan masyarakat. Daerah ini dulu tidak banyak dihuni masyarakat sehingga tidak menjadi masalah, tetapi sekarang daerah ini sudah ramai ditempati masyarakat dan lokasinya pun berada di tengah-tengah kota. Asap di musim kemarau yang diakibatkan oleh kebakaran lahan di pinggiran dan luar Kota Pekanbaru merupakan permasalahan tahunan sejak sepuluh tahun terakhir. Fenomena polusi udara ini berpotensi untuk menjadi masalah di masa datang jika tidak diantisipasi sejak sekarang.
12. Pembangunan pusat kegiatan perdagangan seperti mall, hotel, kompleks ruko, dan pusat perdagangan lainnya yang marak dibangun di pusat kota menimbulkan dampak pada bertambahnya kemacetan kota karena bertumpuknya aktifitas. Jika tidak ada usaha untuk merangsang dalam menyebarkan pembangunan ke daerah pinggiran, dikhawatirkan hal ini akan berpotensi pada ketidaknyamanan di pusat kota. Potensi masyarakat dan swasta untuk ikut menertibkan dan membangun dengan wawasan kesehatan sangat besar jika bisa dimanfaatkan dan dirangsang partisipasinya.

### 2.1.2. Demografi.

1. Pesatnya perkembangan dan pertumbuhan kota Pekanbaru di berbagai bidang, telah berdampak terhadap tingginya pertumbuhan penduduk di daerah ini. Pertumbuhan ini bukan karena banyaknya jumlah kelahiran, akan tetapi terjadinya migrasi penduduk cukup besar ke daerah ini. Pada bulan Oktober 1990, jumlah penduduk kota Pekanbaru sebanyak 398.694 jiwa, sedangkan pada bulan Juni 2005 jumlah penduduk 720.197 jiwa, atau mengalami pertumbuhan sebesar 4,15% per tahun. Angka ini melampaui angka pertumbuhan penduduk Provinsi Riau yang hanya 3,8% per tahun dan nasional sebesar 1,5% per tahun. Pada Tahun 2005 kepadatan penduduk mencapai 1.156 jiwa/km<sup>2</sup>. Dalam waktu 20 Tahun mendatang, dengan rata-rata pertumbuhan 4,15% per tahun, diperkirakan jumlah penduduk kota Pekanbaru sebesar 1.559.472 jiwa. Dengan demikian kepadatan penduduk menjadi 3.358 jiwa/km<sup>2</sup> dengan luas daerah yang tetap. Jumlah penduduk yang demikian besar merupakan potensi pasar yang besar pula jika memiliki daya beli yang kuat. Ketersediaan tenaga kerja tidak menjadi persoalan. Permasalahan muncul jika penduduk yang besar jumlahnya ini tidak memiliki daya beli karena kesejahteraan yang rendah, akibatnya jumlah pengangguran dan kriminalitas akan meningkat. Selain itu, pelayanan masyarakat dan penataan kota akan menjadi lebih sulit jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan secara cermat.
2. Tingkat pendidikan penduduk kota Pekanbaru yang berumur 10 tahun ke atas cukup beragam yang menggambarkan tingkat kualitas sumberdaya manusianya. Terdapat sebesar 37,63% penduduk berumur 10 tahun keatas yang berpendidikan SLTA, berpendidikan SLTP sebesar 20,00%. Sedangkan yang sedikit adalah penduduk yang berpendidikan Akademi, namun masih terdapat pula sekitar 11,58% penduduk berumur 10 tahun keatas yang tidak sekolah. Dari jumlah penduduk tersebut hanya 46,29% yang bekerja sedangkan selebihnya adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, sekolah, mengurus rumah tangga dan lain sebagainya. Kualitas SDM yang rendah dilihat



dari segi pendidikan merupakan ancaman di masa depan, apalagi jika tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan di dunia kerja.

3. Jumlah pencari kerja dari tahun ke tahun terus meningkat, jika pada tahun 2002 jumlah pencari kerja sebanyak 10.238 orang, maka pada tahun 2005 meningkat menjadi 26.793 orang, atau mengalami kenaikan sebesar 38,00%. Berdasarkan tingkat pendidikan pencari kerja didominasi oleh mereka yang berpendidikan SMA sederajat (43,29%), kemudian diikuti yang berpendidikan SD (22,01%), sedangkan yang sedikit adalah SMP yakni 2,22%. Dari jumlah pencari kerja seperti disebutkan diatas, pada tahun 2005 hanya 5,00% yang dapat diterima untuk bekerja (angka yang terdaftar). Rendahnya tingkat kompetensi dari pencari kerja merupakan ancaman di masa datang. Pemberlakuan globalisasi dan pasar bebas akan berakibat buruk pada tenaga kerja yang tidak memiliki Kompetensi. Karena bila Kompetensi tenaga kerja tidak ditingkatkan, tenaga kerja akan kalah bersaing.
4. Kesenjangan antara ketersediaan lowongan kerja dengan pertumbuhan angkatan kerja masih menjadi permasalahan. Lowongan kerja yang tersedia tahun 2002 adalah 1.080, tahun 2003 tersedia 1.863 lowongan dan tahun 2004 menurun menjadi 863 lowongan, sedangkan pada tahun 2005 lowongan kerja yang tersedia 1.409 lowongan. Sementara itu pencari kerja yang terdaftar juga meningkat. Tingginya angka pengangguran terdidik ini sebenarnya juga akibat tidak cukup berkembangnya investasi memadai di sektor riil untuk menyerap tenaga kerja lokal. Penerimaan pegawai negeri sipil yang terbatas, juga terjadi pada perusahaan-perusahaan swasta baik di bidang industri, manufaktur, keuangan, perbankan dan perdagangan.
5. Kota Pekanbaru sudah memiliki sistem informasi kependudukan yang memadai yakni Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), namun sistem ini masih belum berjalan maksimal. Pengelolaan data kependudukan berguna bagi kebijakan pembangunan, pendataan kemiskinan, pemilih, keluarga berencana, dan perencanaan.

6. Penyebaran penduduk kota Pekanbaru masih belum merata. Konsentrasi penduduk berada di Kecamatan Pekanbaru Kota, Sukajadi, Sail, Lima Puluh dan Senapelan dengan kepadatan antara 5.500 Jiwa/Km<sup>2</sup> sampai 13.000 Jiwa/Km<sup>2</sup>. Jadi 31% penduduk kota mendiami areal 3,4% luas kota. Konsentrasi penduduk dipusat kota jika tidak bisa dikendalikan akan menimbulkan masalah dimasa yang akan datang baik kemacetan, keamanan, ketertiban, pelayanan publik serta daya dukung lahan.

### **2.1.3. Perekonomian dan Sumber Daya Alam.**

1. Kota Pekanbaru memiliki potensi sumber daya alam berupa lahan, hutan, air (sungai) dan udara yang merupakan aset potensial apabila dimanfaatkan secara optimal. Kota Pekanbaru memiliki luas 632,26 km<sup>2</sup>, dari luas tersebut, 25,51% merupakan lahan hutan (kawasan lindung), luas peruntukan lahan pertanian 16,28% dan untuk pemukiman diperuntukkan sebesar 39,79%. Masih luasnya daerah yang belum digarap merupakan potensi tersendiri untuk pengembangan kota. Tetapi di sisi lain, konversi lahan pertanian dan hutan menjadi lahan pemukiman, industri dan perdagangan akan berakibat besar pada keseimbangan lingkungan.
2. Kota Pekanbaru memiliki potensi hutan seluas lebih kurang 4.133 ha (termasuk yang sudah dikonversi menjadi kebun sawit). Selain itu Pekanbaru memiliki Taman Hutan Raya seluas 3.080 ha dari total luas 6.172 ha yang merupakan kawasan yang dimiliki bersama oleh Kabupaten Siak, Kampar dan Kota Pekanbaru. Kawasan hutan ini memiliki potensi flora dan fauna yang cukup besar. Potensi floranya, kawasan ini ditumbuhi berbagai jenis kayu, seperti; *meranti*, *balam*, *kepenis*, *benuang*, *nyatoh*, *mersawa*, *kulim*, *kempas*, *kelat*, *bintangor*, *rengas*, *pisang-pisang* dan *arang-arang*. Disamping itu, kawasan hutan ini juga memiliki potensi fauna berupa 42 jenis burung, 4 jenis reptilia dan 16 jenis mamalia. Kawasan ini disamping merupakan objek wisata

alam, juga berpotensi dikembangkan sebagai kawasan plasma nutfah tanaman, hewan dan hutan pendidikan.

3. Tumpang tindih pendataan hutan antara wilayah pemerintahan kota dan Provinsi menimbulkan kerancuan dalam perencanaan penggunaan tata ruang wilayah (RTRW). Kawasan hutan Tahura sampai saat ini pengelolaannya masih dilakukan oleh pihak Provinsi, sehingga pemerintah kota Pekanbaru tidak dapat memanfaatkannya untuk berbagai keperluan yang dapat memberikan nilai tambah. Populasi hutan baik di daerah perkotaan maupun di pinggiran kota kian berkurang akibat alih fungsi lahan hutan untuk berbagai keperluan, baik untuk kawasan pemukiman penduduk, industri, dan olahraga.
4. Potensi sumber daya air yang terdapat di kota Pekanbaru adalah berupa sungai, waduk, rawa-rawa dan air tanah. Sungai Siak merupakan sungai besar yang melintasi kota Pekanbaru yang mengandung potensi sumber daya air dan perikanan yang cukup berarti. Disamping itu Sungai Siak merupakan sarana perhubungan yang vital bagi lalu lintas kapal yang masuk dan keluar kota Pekanbaru. Banyaknya aktivitas masyarakat di sekitar aliran sungai siak, terutama aktivitas industri telah menimbulkan pencemaran sungai yang berdampak terhadap kualitas air. Disamping itu lalulintas kapal dengan kecepatan tinggi menggerus tebing sungai.
5. Pada tahun 2005, jumlah bank yang ada di kota Pekanbaru sebanyak 97 bank yang terdiri dari bank umum swasta nasional sebanyak 53 bank, bank umum pemerintah sebanyak 35 bank dan Bank Pembangunan Daerah 9 bank. Dalam beberapa tahun terakhir jumlah bank yang ada di Kota Pekanbaru menunjukkan angka yang terus meningkat. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru yang relatif tinggi. Sehingga sangat menarik bagi investor untuk menanamkan modal di Kota Pekanbaru termasuk bidang perbankan.
6. Sampai tahun 2005 sarana perdagangan yang ada di Kota Pekanbaru terdiri dari 7 buah pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah kota

dan 3 buah pasar modern yang dikelola oleh investor. Jumlah ini tidak mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2002, namun terlihat menurun jika dibandingkan dengan tahun 2000 dan 2001, khususnya untuk pasar tradisional. Jumlah kios dan los serta jumlah pedagang yang dapat ditampung masing-masing sebanyak 3.833 unit/orang dan 1.247 unit/orang. Jumlah pedagang kaki lima sebanyak 1.125 orang. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, dimana jumlah kios, los/pedagang yang dapat di tampung sebanyak 2.101unit/orang dan 896/unit orang dan pedagang kaki lima sebanyak 975 orang. Kecenderungan menurunnya jumlah pasar tradisional dan meningkatnya pasar modern, mall, supermarket dan sejenisnya merupakan fenomena kota besar yang menyebabkan semakin terpinggirnya aktivitas perdagangan tradisional yang menghidupi dan mempengaruhi kesejahteraan banyak warga menengah ke bawah.

7. Sampai tahun 2005 jumlah Koperasi di Kota Pekanbaru berjumlah 734 unit dengan jumlah anggota sebanyak 75.262 orang dan jumlah karyawan sebanyak 356 orang. Jumlah modal Koperasi sebesar Rp.94,27 milyar, yang terdiri dari modal sendiri sebesar Rp.58,42 milyar (61,97%), volume usaha sebesar Rp.167,39 milyar dan sisa hasil usaha (SHU) yang dibagikan sebesar Rp.10,48 milyar. Dari jumlah koperasi tersebut terdapat sebanyak 499 unit (62,53%) yang masih aktif. Jika diamati sejak tahun 2001 telah terjadi peningkatan jumlah koperasi sekitar 5,83%, dimana pada tahun 2001 berjumlah 638 unit dan pada tahun 2004 menjadi 798 unit dengan jumlah anggota meningkat sebanyak 0,25% dalam periode yang sama. Jumlah koperasi yang tidak aktif meningkat sebesar 42,44%, dimana pada tahun 2000 jumlah koperasi yang tidak aktif sebanyak 51 unit dan pada tahun 2004 menjadi 299 unit, ini berarti jumlah koperasi yang aktif menurun sebesar 1,93% dalam periode yang sama. Selama periode 2001-2004 telah terjadi peningkatan modal koperasi 15,55%, dimana peningkatan modal sendiri sebesar 12,88% dan modal luar sebesar 16,98%. Demikian juga volume usaha dan sisa hasil usaha meningkat dalam periode yang sama

masing-masing sebesar 40,79% dan 24,35%. Dari gambaran kondisi umum perkoperasian di atas, terkesan masih lemahnya pembinaan terhadap koperasi yang ada, baik menyangkut kualitas sumberdaya manusia, kelembagaan dan manajemen yang akan bermuara terhadap kemandirian dan kemampuan daya saing koperasi. Dalam struktur Perekonomian yang berbasis masyarakat, maka keberadaan Koperasi sebagai soko guru perekonomian dan UMKM sebagai pilar ekonomi kerakyatan perlu diberdayakan. Seiring dengan itu, perlu adanya kebijakan yang berpihak kepada Koperasi dan Pelaku UMKM yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan KUMKM untuk dapat bersaing secara sehat dengan para pelaku ekonomi lainnya. Untuk itu, diharapkan pada tahun 2025 mendatang akan tercipta kelembagaan koperasi yang sehat dan berkualitas sehingga mampu mensejahterakan anggotanya dan masyarakat melalui terwujudnya UMKM yang tangguh dan mandiri.

8. Jenis industri yang terdapat di kota Pekanbaru terdiri dari industri pangan, sandang, kimia dan bahan bangunan, logam dan elektronika dan kerajinan. Sampai tahun 2005 jumlah usaha industri pangan sebanyak 25 unit dengan tenaga kerja yang terserap sebanyak 155 orang dan nilai investasi sebesar Rp.3.198.000.000,-. Jumlah unit usaha industri sandang sebanyak 6 unit dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 28 orang dengan nilai investasi sebesar Rp.363.000.000,-. Jumlah unit usaha industri kimia dan bahan bangunan sebanyak 56 unit dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 665 orang dengan nilai investasi sebesar Rp.12.822.500.000,-. Jumlah unit usaha industri logam dan elektronik sebanyak 16 unit dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 97 orang dengan nilai investasi sebesar Rp.1.807.500.000,-. Dan jumlah unit usaha industri kerajinan sebanyak 2 unit dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 665 orang dengan nilai investasi sebesar Rp.4.284.633.000,-. Cluster industri masih rancu menurut penilaian Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pusat

Statistik (BPS), Perbankan dan Koperasi UKM. Akibatnya terjadinya tumpang tindih pembinaan bagi usaha/industri/pedagang mikro-kecil dan menengah. Di lain pihak masih rendahnya mutu sumberdaya manusia dan sistem pembinaan kepada pelaku usaha industri yang tidak berkelanjutan dan tuntas serta terbatasnya akses industri kecil terhadap permodalan, bahan baku, bahan penolong, teknologi dan pemasaran.

9. Pembangunan sektor pertanian, khususnya untuk komoditi palawija, sayur-sayuran dan hortikultura (buah-buahan dan tanaman hias) sangat potensial mengingat tingginya permintaan masyarakat kota Pekanbaru. Sementara produksi yang dihasilkan di daerah ini belum dapat memenuhi permintaan masyarakat, sehingga kekurangannya terpaksa di datangkan dari daerah lain, baik dari dalam Provinsi Riau maupun dari provinsi lain. Disamping itu masih tersedia lahan yang belum diolah berupa lahan kering seluas 4.133 ha (6,54%) dan lahan rawa seluas 1.338 ha (2,12%). Permasalahan terletak pada semakin terbatasnya ketersediaan lahan yang dapat digunakan untuk usaha pertanian, masih rendahnya produktivitas usahatani akibat masih terbatasnya penggunaan teknologi, lemahnya permodalan dan akses pemasaran. Pada masyarakat yang terlibat dengan usaha pertanian, pertanian sendiri bukan merupakan mata pencaharian utama karena kepemilikan lahan sekitar 80% bukan milik petani pengolah.
10. Beberapa komoditi Palawija yang diusahakan di kota Pekanbaru antara lain jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang tanah. Sedangkan jenis komoditi sayuran, antara lain cabe, kacang panjang, timun, terung, bayam, kangkung, dan sawi. Pada tahun 2005 luas panen komoditi palawija mencapai 553 ha, sayuran 1.573 ha, dan tanaman buah-buahan seluas 296 ha. Selama periode tahun 2001-2005, luas tanam komoditi palawija meningkat sebesar 20,16%, komoditi sayuran meningkat 5,59% dan komoditi buah-buahan meningkat sebesar 6,22%. Peningkatan luas tanam menyebabkan meningkatnya produksi komoditi palawija sebesar 12,20%, dengan produktivitas sebesar 8,88

kwintal/ha, sayuran 6,22% dengan produktivitas 8,64 kwintal/ha. Sedangkan produksi buah-buahan meningkat sebesar 132,01% dengan produktivitas 22,79 ton/ ha.

11. Produksi perikanan dari berbagai usaha budidaya mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2001 produksi usaha perkolaman sebanyak 164,3 ton meningkat menjadi 216,24 ton pada tahun 2005, atau mengalami peningkatan sebesar 7,38%. Pada usaha budi daya keramba produksi pada tahun 2001 sebanyak 2,8 ton meningkat menjadi 15 ton pada tahun 2005 atau mengalami peningkatan sebesar 49,77% per tahun. Sedangkan pada usaha pembenihan produksi meningkat dari 4.470.000 ton pada tahun 2001 menjadi 18.860.000 ton pada tahun 2005 atau mengalami peningkatan sebesar 40,71. Permasalahan terletak pada masih terbatasnya unit usaha budi daya perikanan, terbatasnya lahan yang sesuai untuk budi daya perikanan, sumber air yang memadai, dan masih sulitnya memperoleh sarana produksi perikanan seperti bibit/benih, pakan dan lain sebagainya.
12. Produksi sub sektor peternakan juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik berupa daging maupun telur. Pada tahun 2001 jumlah produksi daging sebanyak 9.614.145 kg dan pada tahun 2005 menjadi 10.990.674 kg, atau mengalami pertumbuhan sebesar 3,67%. Produksi telur meningkat dari 33.909.782 butir menjadi 35.408.259 butir dalam periode yang sama atau mengalami pertumbuhan sebesar 2,24%. Permasalahan terletak pada masih sedikitnya unit usaha budi daya peternakan, terutama untuk ternak besar seperti sapi, kerbau dan kambing dan mahal nya biaya pembelian sarana produksi. Khusus untuk usaha peternakan ayam dan sapi adanya ancaman penyakit ternak seperti anthraks dan flu burung.
13. Kontribusi PDRB per sektor, sampai tahun 2005 didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yakni mencapai 30,75%, sektor jasa sebesar 17,22%, dan sektor keuangan sebesar 5,87%. Dominasi sektor

perdagangan dan jasa dalam PDRB merupakan peluang bagi Pekanbaru untuk membangun kota.

14. Meskipun letak Kota Pekanbaru cukup strategis sebagai ibukota dan pintu gerbang Propinsi Riau, ternyata pengembangan kepariwisataan belum berkembang dikarenakan infrastruktur belum memadai. Objek wisata di Kota Pekanbaru antara lain wisata rekreasi Alam Mayang dan Danau Buatan, wisata belanja Pasar Bawah dan Pasar Pusat, wisata religi Masjid Raya dan Masjid Agung, wisata sejarah Monumen Kereta Api dan Pahlawan Kerja. Objek-objek tersebut belum dikelola secara maksimal dan belum adanya kerjasama dengan Asosiasi Usaha Perjalanan Wisata /ASITA (Tour & Travel) serta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, mengenai objek-objek wisata dimaksud. Fungsi fasilitas pemerintah perlu ditingkatkan untuk mendorong asosiasi dan perhimpunan untuk mencari, mengembangkan dan menawarkan objek-objek wisata yang ada. Publikasi dan promosi objek wisata masih kurang, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sumbangan untuk PAD dari sektor pariwisata masih belum optimal. Tahun 2002 tercatat Rp 139 juta, tahun 2003 meningkat menjadi Rp 150 juta dan tahun 2004 sedikit meningkat menjadi Rp 155 juta.
15. Berdasarkan data hasil publikasi BPS Tahun 2004, jumlah penduduk miskin Kota Pekanbaru adalah yang terendah di Provinsi Riau dan keempat terendah dari seluruh Kabupaten/Kota yang di Sumatera setelah Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, dan Kota Padang, yakni hanya sebesar 4,35% dari jumlah penduduk dan jauh berada di bawah jumlah penduduk miskin Provinsi Riau sebesar 13,12%, data tersebut jauh lebih rendah dari hasil pendataan Badan Litbang Provinsi Riau sebesar 10,88% dan juga jauh berada di bawah jumlah penduduk miskin Provinsi Riau yang mencapai 23,68%. Jumlah penduduk miskin Kota Pekanbaru berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2004 mengalami penurunan yang cukup besar dibandingkan tahun 2002 yang mencapai 6,46%. Fenomena rendahnya tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru, dapat dilihat dari beberapa data



pendukung di antaranya adalah dari aspek pendapatan dimana garis kemiskinan yang ditetapkan untuk Kota Pekanbaru adalah sebesar Rp 227.300,- /kapita/bulan. Penghitungan garis kemiskinan adalah yang didasarkan pada penghitungan di sesuaikan dengan tingkat perkembangan Indek Harga Konsumen (IHK) yang tidak sama antara satu kota/kabupaten dengan kota/kabupaten lainnya. Oleh karena IHK Kota Pekanbaru termasuk yang tertinggi di Sumatera, maka garis kemiskinan Kota Pekanbaru juga termasuk yang tertinggi yakni urutan ketiga setelah Kota Batam dan Tanjungpinang.

16. Pada tahun 2005, PAD Kota Pekanbaru sebesar Rp 86,926 milyar. Jumlah ini masih bisa terus ditingkatkan. Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru setiap tahunnya diprediksi meningkat sebesar 10% pertahun, sehingga pada tahun 2025 Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp 585 milyar. Meskipun demikian, trend penurunan produksi minyak bumi di Riau akan turun sehingga mengurangi dana bagi hasil untuk APBD Kota Pekanbaru.
17. Kawasan Industri Tenayan (KIT) yang berada di Kecamatan Tenayan Raya. Saat ini telah dilakukan pembebasan lahan seluas 306 Ha dari 1.500 Ha yang direncanakan. Kawasan Industri Tenayan ini diperuntukan untuk menampung industri yang beroperasi didalam kota maupun pembangunan industri baru. Kawasan ini masih berupa lahan kosong, yang belum dilengkapi dengan infrastruktur, pembangunan infrastruktur ini dimulai tahun 2010 dan selesai tahun 2020.

#### **2.1.4. Sosial, Budaya dan Politik.**

1. Derajat kesehatan masyarakat ditentukan sesuai urutannya yaitu lingkungan sehat, perilaku sehat, akses untuk memperoleh pelayanan kesehatan, serta keturunan. Sampai dengan akhir tahun 2005, jumlah rumah sakit 15 unit, yang terdiri dari rumah sakit pemerintah dan TNI/Polri 5 unit, swasta 10 unit sudah termasuk 2 rumah sakit khusus ibu dan anak. Puskesmas induk 15 unit yang terdiri dari puskesmas perawatan 4 unit dan non perawatan 11 unit. Puskesmas pembantu 32

unit. Rumah bersalin 76 unit, balai pengobatan 157 unit. Tenaga medis dan paramedis yang melayani kesehatan masyarakat berjumlah 1.930 orang yang terdiri dari dokter spesialis 98 orang, dokter umum 220 orang, dokter gigi 87 orang, bidan 382 orang, perawat 1.112 orang, apoteker 31 orang dan asisten apoteker 52 orang. Secara kuantitas, tenaga kesehatan telah cukup memadai namun di sisi kualitas dan penyebaran masih belum merata. Belum terintegrasinya sistem pelayanan, manajemen pelayanan, sokongan pendanaan, juga sangat berpengaruh kepada aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

2. Dengan diterapkannya pasar bebas, institusi rumah sakit asing mempunyai kesempatan menawarkan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas. Hal ini merupakan tantangan bagi institusi kesehatan yang dibangun pemerintah dan swasta di Pekanbaru, sekaligus merupakan motivasi untuk dapat meningkatkan pelayanannya. Perkembangan daerah yang cukup pesat sebagai dampak dari otonomi daerah, merupakan peluang bagi pertumbuhan institusi pelayanan kesehatan masyarakat.
3. Kota Pekanbaru merupakan daerah endemik penyakit menular, seperti penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Jumlah penderita penyakit demam berdarah selalu meningkat setiap tahun. Pada tahun 2003 jumlah penderita sebanyak 63 orang dan meninggal sebanyak 3 orang, tahun 2004 jumlah penderita sebanyak 253 orang dan jumlah yang meninggal dunia sebanyak 3 orang, sedangkan pada tahun 2005 jumlah penderita sebanyak 722 orang dan jumlah yang meninggal sebanyak 12 orang. Jumlah penderita HIV/ AIDS di Kota Pekanbaru meningkat setiap tahun, seperti fenomena gunung es, tahun 2003 penderita HIV sebanyak 18 orang dan jumlah penderita AIDS sebanyak 5 orang, tahun 2004 jumlah penderita HIV sebanyak 3 orang dan penderita AIDS sebanyak 10 orang, sedangkan jumlah kumulatif penderita HIV sampai tahun 2005 sebesar 4 orang dan penderita AIDS sebanyak 33 orang.

4. Dengan semakin tingginya harapan hidup manusia, maka perlu dipikirkan upaya pelayanan bagi masyarakat usia lanjut seperti stroke, kelumpuhan, kanker dan kemunduran fisik. Kebutuhan akan taman kota bagi masyarakat usia lanjut untuk berolahraga dan rileks sangat urgen di masa depan.
5. Perilaku masyarakat masih jauh dari kebiasaan hidup bersih dan sehat. Kebersihan diri, rumah, maupun lingkungan merupakan prasyarat untuk mendapatkan tingkat kesehatan yang baik. Kesadaran masyarakat yang rendah akan hal ini menyebabkan permasalahan kesehatan yang besar dan membutuhkan biaya yang besar untuk pengobatannya. Padahal pencegahan penyakit dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan lebih mudah dan lebih murah biayanya. Di masa depan, permasalahan kebersihan lingkungan akan menjadi isu penting jika penataan kebersihan lingkungan tidak dilakukan dengan baik.
6. Kebiasaan hidup sehat masyarakat dalam bentuk melakukan aktivitas olahraga secara rutin cukup baik. Tetapi fasilitas untuk melakukan kegiatan olahraga bagi warga kota seperti jalur khusus untuk pejalan kaki / trotoar, lapangan ruang terbuka untuk berolahraga, track untuk lari/ jogging, gymnasium dan stadion untuk pusat kegiatan olahraga masih terbatas. Di masa depan, dengan semakin berkurangnya aktivitas fisik karena kemudahan yang didapat dari berkembangnya teknologi, akan membuat aktivitas olahraga menjadi sangat penting bagi warga kota untuk mendapatkan badan yang sehat.
7. Pelayanan kesehatan yang masih kurang memadai, perlu tenaga medis dan paramedis yang profesional dalam rangka peningkatan pelayanan bidang kesehatan dan masih banyak keluhan-keluhan masyarakat menyangkut tingkat pelayanan yang kurang memuaskan baik di puskesmas maupun puskesmas pembantu.
8. Kondisi/ lokasi pembangunan sarana pelayanan kesehatan (Rumah Sakit/ Puskesmas/ Laboratorium dll) masih banyak yang mengkhawatirkan bagi kesehatan lingkungan, perlu ketegasan regulasi

pendirian sarana kesehatan sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

9. Urbanisasi dan heterogenitas penduduk bila tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan kerawanan sosial yang berdampak pada peningkatan kriminalitas dan penyakit masyarakat. Kaum urban dengan skill dan kompetensi yang rendah, berpotensi menjadi beban pembangunan. Sebagai sentra pertumbuhan yang berkembang cukup pesat, Pekanbaru akan menjadi daerah tujuan urbanisasi. Jika penataan kaum pendatang dengan kemampuan dan skill yang rendah tidak mampu bersaing maka akan meningkatkan angka kemiskinan perkotaan, daerah kumuh, gelandangan, pengemis, tuna wisma dan orang gila.
10. Secara alamiah, penduduk kota Pekanbaru telah menjadi suatu kota dengan masyarakat yang majemuk, terdiri dari berbagai etnis, suku bangsa dan agama. Masyarakat yang heterogen memberikan peluang untuk terjadinya interaksi yang positif, saling mempengaruhi sikap dan budaya yang pada akhirnya menjadi inspirasi ke arah kemajuan. Suatu kelompok masyarakat dapat mengambil sifat dan karakter yang positif dari kelompok yang lain yang lebih maju. Pluralisme atau kebhinekaan dalam masyarakat kota Pekanbaru tak terhindarkan, seperti juga terjadi di kota-kota lainnya di Indonesia. Di lain pihak, keberagaman jika tidak dikelola dengan baik bisa menjadi bibit perpecahan dan bahkan permusuhan.
11. Sebagai ibukota Provinsi, dimana Budaya Melayu merupakan budaya tempatan, dengan karakternya yang terbuka, toleran, moderat, maka merupakan hal yang wajar bila kota Pekanbaru merumuskan visi kota dengan menempatkan budaya Melayu sebagai jiwa/ ruh dan spirit yang mengarahkan pembangunan kota ini ke depan. Ekspresi budaya ini menjadi tantangan tersendiri untuk mewujudkannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembentukan lingkungan perkotaan, dan karakter masyarakat kota Pekanbaru. Kebudayaan Melayu sebagai

kebudayaan dari masyarakat lokal, tetapi dapat berkembang di tengah-tengah masyarakat kota

yang menuju kota metropolis. Melayu yang identik dengan Islam dimana adat bersendikan syarak dan syarak bersendikan Kitabullah sudah membudaya di tengah masyarakat.

12. Kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya dalam kehidupan semakin meningkat. Selain itu, pengaruh kebudayaan dari luar dengan kemajuan teknologi akan semakin mudah dan cepat masuk ke Pekanbaru. Peran budaya Melayu untuk memperkokoh nilai-nilai luhur yang mulia dalam membendung pengaruh buruk dari globalisasi sangat strategis di masa mendatang sesuai visi kota Pekanbaru, menjadikan kota Pekanbaru sebagai pusat budaya Melayu, namun pada saat ini masih kurang melibatkan peran serta kelembagaan yang representatif dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menumbuhkembangkan budaya Melayu, serta menjaga kelestarian nilai-nilai budaya Melayu. Keragaman ekspresi kesenian termasuk kesenian yang modern menjadi media hiburan yang mampu menjalin rasa kebersamaan sesama warga kota. Di masa depan, masyarakat modern yang semakin sibuk membutuhkan media kesenian di tengah kegersangan dan kesibukannya karena kecepatan dinamika; mudahnya komunikasi sehingga menyebabkan warga jarang berkumpul bersama; semakin renggangnya ikatan sosial; dan semakin efisiennya pergerakan.
13. Belum berkembangnya pariwisata di Kota Pekanbaru, sehingga sulit sekali baik bagi masyarakat kota Pekanbaru maupun pendatang untuk berwisata di Pekanbaru, dan perlu pengkajian untuk pengembangan pariwisata di Pekanbaru.
14. Masalah sosial di Pekanbaru bermunculan, seperti banyaknya pengangguran, kurangnya fasilitas perumahan, bertambahnya jumlah pedagang kaki lima yang tidak tertib, masalah kebersihan kota, meningkatnya angka kriminalitas, prostitusi, pelecehan seksual, praktek perjudian dan perdagangan anak dan wanita, serta penyalahgunaan

narkoba, bila persoalan diatas tidak diikuti dengan perkembangan daerah hinterland Kota Pekanbaru akan menjadikan permasalahan sosial, terkonsentrasi di kota Pekanbaru.

15. Kemajemukan masyarakat kota Pekanbaru tetap membuka peluang untuk terciptanya kerukunan dan persaudaraan. Perbedaan asal usul, agama, ras dan etnis merupakan karunia Tuhan YME yang mendorong perlunya kerjasama dan bahu membahu dalam meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan dalam semua bidang kehidupan, politik, sosial, budaya dan ekonomi. Telah terbangunnya saling pengertian dan saling pemahaman diupayakan terus menerus baik oleh pemerintah kota, maupun Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Adat, dan tokoh masyarakat.
16. Hak menyampaikan pendapat di depan umum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi masyarakat kota Pekanbaru. Keadaan ini memberikan kesadaran baru bagi pemerintah terhadap pendapat dan sikap yang berbeda. Kelahiran beragam media massa di kota Pekanbaru memberikan aspek yang positif dalam meningkatkan kesadaran politik warga kota dan semakin terciptanya transparansi dalam pembangunan.
17. Hak warga negara dalam mendirikan partai politik telah menjadi bagian kehidupan politik warga kota. Dalam pemilu, tahun 1999 dan 2004 eksistensi partai politik diseleksi secara alamiah, sehingga tidak semua peserta pemilu tahun 1999 (48 partai) dapat mengikuti pemilu berikutnya. Kehidupan politik yang dinamis akan selalu terjadi di masa depan dan rakyat semakin memahami dunia politik sehingga pilihan politik terlihat semakin dewasa dan mandiri. Pada pemilu 2004 tidak semua peserta pemilu berhasil mendudukkan wakil-wakilnya di DPRD Kota Pekanbaru. Pengaruh dinamika politik internasional yang terjadi antara kelompok barat dan kelompok timur dapat mempengaruhi lahirnya ideologi yang mempunyai afiliasi pada ideologi yang beruang lingkup internasional.

18. Kehidupan kebebasan berserikat di kalangan masyarakat tumbuh dan berkembang. Berbagai organisasi kemasyarakatan dibentuk sesuai dengan aspirasi yang hidup. Di samping organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, buruh, paguyuban, beragam profesi, kalangan swasta, kalangan pendidikan, wartawan, keagamaan, juga terbentuk organisasi yang berafiliasi pada partai-partai politik. Hadirnya organisasi yang beragam ini memberikan ruang partisipasi publik dalam ikut serta membangun kebersamaan sesama warga kota. Ada kekuatan/kelompok masyarakat yang tidak puas pada hasil-hasil pembangunan dan berusaha untuk memprovokasi kelompok masyarakat lainnya sehingga terkadang memunculkan kondisi yang kurang harmonis.
19. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengisi bagian-bagian tertentu dari beragamnya aspek kehidupan masyarakat. Mereka bergerak di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pendidikan, anak terlantar, yatim piatu, pendidikan politik, pendampingan masyarakat, dan pertanahan. Dalam banyak hal LSM telah dapat memberikan pencerahan dalam ikut serta memajukan kehidupan warga kota. Di samping itu, ada ancaman ideologi baik melalui gerakan maupun dengan kekuatan finansialnya kelompok masyarakat di negara asing senantiasa bersedia menyediakan dana bagi kelompok-kelompok swadaya masyarakat dengan tujuan melakukan disintegrasi atau mengeksploitir kelemahan bangsa Indonesia.

### **2.1.5. Sarana dan Prasarana.**

1. Tahun 2004 di wilayah Kota Pekanbaru, jalan nasional (128,256 km dan semuanya beraspal) sebanyak 76,62 % dalam kondisi baik. Jalan Propinsi (135,2 km) yang beraspal 84,3 %. Dari jumlah itu, hanya 48,1% dalam kondisi baik/ Jalan kota (2.426,84 km) lebih parah lagi keadaannya, 38,8% aspal, 1,7% kerikil, dan 59,5 % jalan tanah. Dari jumlah itu hanya 42,5% dalam kondisi baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas jalan propinsi dan jalan kota di Pekanbaru sangat rendah. Disamping itu, masih banyak ruas jalan yang belum dilengkapi

dengan drainase jalan sehingga mempercepat kerusakan jalan akibat tergenangnya badan jalan. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang sangat tinggi dibandingkan dengan peningkatan pembangunan jalan merupakan ancaman di masa depan. Jika prioritas, efisiensi dan efektifitas pembangunan ruas jalan dan sistem transportasi tidak mendapat perhatian, maka dikhawatirkan dengan dana yang terbatas, pelayanan prasarana transportasi masyarakat akan menjadi masalah serius.

2. Jaringan jalan lingkungan di Kota Pekanbaru masih perlu penataan lebih baik. Selama ini jaringan jalan lingkungan mengikuti kondisi lahan lingkungan yang ada, tanpa memperhatikan aspek penataan lalu lintas dan pengembangan kota. Akibatnya, akses dan jaringan transportasi menjadi sulit ditata, apalagi jika banyak daerah kosong dibangun. Jalan-jalan yang dibuat oleh masyarakat umumnya sempit (maksimum 6 m termasuk drainase), bahkan di beberapa tempat hanya dibuat untuk lebar 3 m saja. Geometri jalan di persimpangan banyak yang tidak sempurna dengan radius tikungan yang kecil dan sempit. Penataan persimpangan kurang mendapat perhatian sehingga menambah kemacetan. Sementara itu, jalan lingkaran bagian Utara dan Timur kota masih belum direalisasikan sehingga menyebabkan truk dan trailer melintasi tengah kota yang mengganggu lalu lintas.
3. Sarana transportasi di dalam kota didominasi oleh angkutan kota(angkot), bus kota, taksi dan bajaj. sementara untuk beberapa kawasan yang tidak dilalui angkutan umum terdapat sejumlah pangkalan ojek sepeda motor untuk melayani masyarakat. Jumlah angkutan umum (oplet, bus, taxi dan bajaj) dalam kota terus meningkat. Tahun 2002 tercatat 2.448 unit angkutan umum, meningkat menjadi 2.503 unit tahun 2003 dan tahun 2004 tercatat 2.559 unit. kondisi lalu lintas saat ini masih semrawut disebabkan oleh ketidakdisiplinan supir dan masyarakat pengguna jalan. Peningkatan jumlah kendaraan saat ini belum diikuti dengan kebijakan terhadap pengaturan izin trayek, sehingga penyebarannya belum merata.



4. Kota Pekanbaru yang dibelah oleh Sungai Siak dihubungkan oleh jembatan Siak I di tengah dan Siak II di sebelah Barat. Kondisi jembatan Siak I yang semakin menurun kondisinya tidak bisa dilewati oleh Bus dan truk. Di samping itu volume lalu Lintas semakin ramai karena berkembangnya daerah Rumbai di utara kota. Jembatan-jembatan lain di dalam Kota Pekanbaru dalam keadaan sempit dan rusak serta tidak mampu menampung volume lalu lintas yang semakin meningkat.
5. Hingga akhir tahun 2005, terminal angkutan darat masih menggunakan terminal Mayang Terurai yang terletak di tengah-tengah kota. Terminal ini memiliki kapasitas yang kecil dan tidak bisa menampung kebutuhan terminal antar kota antara propinsi (AKAP). Akibatnya, Jalan Tuanku Tambusai menjadi tempat pangkalan banyak perusahaan bus dan travel sehingga memacetkan lalu lintas. Terminal barang saat ini masih belum ada di Pekanbaru sehingga kegiatan yang mewakili fungsi terminal barang dilakukan di dalam kota. Hal ini menambah kesibukan di pusat kota. Terminal Bandaraya Payung Sekaki berpotensi untuk memenuhi kebutuhan akan terminal barang, sekaligus angkutan barang dan penumpang antar kota antar propinsi, antar kota dalam propinsi, dan angkutan penumpang perkotaan.
6. Terminal penumpang dan dermaga di pelabuhan Sungai duku sudah memadai baik dari segi kenyamanan maupun keamanan untuk melayani penumpang kapal dari dan ke Pekanbaru. Pelabuhan rakyat yang menyebar di sepanjang sungai Siak.
7. Kebutuhan bandar udara saat ini yang dilayani oleh bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II masih mencukupi, meskipun baru bisa didarati oleh pesawat kelas Boeing 737. Bandara SSK II ini kini telah ramai dikelilingi oleh perumahan dan kegiatan lainnya, meskipun posisinya berada diatas selatan Kota Pekanbaru. Bandara SSK II telah melayani rute dalam dan luar negeri.
8. Perpustakaan di Kota Pekanbaru merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi yang tidak kalah pentingnya dari sumber-sumber yang lain seperti jasa perhotelan, perdagangan dan lainnya. Kota Pekanbaru saat ini sebagai salah satu

kota besar yang terus berkembang, pengelolaan perparkiran masih menggunakan jasa pihak ketiga. Hal ini mengakibatkan, potensi parkir yang relatif besar dan cukup menjanjikan dalam hal penyumbang PAD belum tergali secara optimal, dimana pada tahun 2002 PAD sebesar Rp.1,185 milyar, tahun 2003 Rp.1,314 milyar dan tahun 2004 sebesar Rp.1,459 milyar.

9. Banjir di Kota Pekanbaru umumnya terjadi akibat curah hujan yang tinggi; anak-anak sungai sebagai saluran primer belum tertata dengan baik; jaringan Drainase yang belum tersambung seluruhnya; serta belum lancarnya aliran pada saluran drainase yang ada. Genangan air ini disebabkan karena belum tuntasnya saluran drainase yang mengalirkan air limpahan hujan ke anak sungai dan ke sungai. Selain itu, ada pula banjir yang memang disebabkan oleh rendahnya permukaan tanah pada lokasi yang berdekatan dengan sungai Siak, Sungai Sago, Sungai Sail, Sungai Senapelan, Sungai Air Hitam, dan Sungai Sibam.
10. Pasokan listrik yang terbatas di Riau turut mempengaruhi pasokan listrik kota Pekanbaru. Krisis energi listrik ini menyebabkan banyak warga yang kesulitan untuk membuat sambungan baru ataupun menambah daya listriknya. Kondisi ini tentu mempengaruhi perkembangan ekonomi, industri dan usaha masyarakat. Krisis listrik yang diakibatkan oleh kurangnya daya listrik yang dimiliki oleh PLN. Pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan kegiatan perindustrian dan perdagangan akan meningkatkan penggunaan listrik di masa depan serta akan menghambat pertumbuhan investasi.
11. Jaringan komunikasi yang menggunakan sambungan telepon fixed-line di Kota Pekanbaru sangat terbatas. Di lain pihak, komunikasi dengan menggunakan jaringan telepon seluler semakin meningkat digunakan dan melebihi jumlah pelanggan telepon fixed-line dan kedepan tampaknya akan semakin berkembang. Penggunaan internet sebagai media informasi dan komunikasi semakin banyak digunakan. Radio komunikasi, Stasiun TV, Radio swasta dan pemerintah masih ditemui masalah dengan adanya tumpang tindih frekuensi.

12. Pembangunan perumahan di Pekanbaru tumbuh cukup baik karena kebutuhan masyarakat akan perumahan yang layak masih tinggi. Meskipun demikian, pengawasan pembangunan, persyaratan teknis, lingkungan, dan sosial masih terus di tingkatkan. Kelengkapan fasilitas sosial, drainase dan jalan lingkungan masih menjadi permasalahan pada pembangunan perumahan. Penempatan perumahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis, lingkungan, dan sosial akan menjadi permasalahan besar di kemudian hari karena dapat menjadi penyebab banjir, kemacetan lalu lintas, dan permasalahan sosial lainnya.
13. Jumlah produksi air yang dihasilkan oleh PDAM sebagai salah satu Perusahaan Daerah Pemko Pekanbaru masih sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat di Pekanbaru. Tahun 2005 terdapat 24.587 sambungan rumah (14% dari jumlah rumah tangga di Pekanbaru). Dari jumlah itu 72% diantaranya merupakan sambungan untuk rumah tangga, dan 25% sambungan untuk niaga kecil dan Ruko. Dari jumlah sambungan itu, 19.913 sambungan merupakan pelanggan aktif, dan sisanya adalah pelanggan tidak aktif dengan berbagai alasan di putuskannya aliran air. Kualitas, kuantitas, dan kontinuitas airnya pun masih belum memenuhi harapan pelanggan. Jaringan pipa distribusi dan transmisi yang berusia tua merupakan salah satu hambatan. Pemerintah Kota Pekanbaru sudah mengikat perjanjian kerja sama dengan Perusahaan KTDP untuk meningkatkan produksi, perbaikan, dan penggantian jaringan serta manajemen PDAM Kota Pekanbaru.

#### **2.1.6. Pemerintahan.**

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan banyak bidang pemerintahan telah beralih menjadi kewenangan daerah. Proses transisi ini menyebabkan birokrasi yang panjang dan lamban, melemahnya pengawasan, ketidakefisienan serta penyalahgunaan wewenang. Di sisi lain, adanya kewenangan yang luas dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah merupakan peluang yang sangat berharga dalam berkreasi memenuhi tuntutan dan amanah

masyarakat. Saat ini di Pekanbaru terdapat 17 Dinas, 4 Badan, 6 Kantor, 2 sekretariat, 12 kecamatan, dan 58 kelurahan.

2. Kualitas pelayanan publik pada bidang tertentu masih rendah. Pejabat publik masih ada yang belum memenuhi kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya sehingga menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan menurunnya tingkat pelayanan pada masyarakat. Iklim dan motivasi kerja di kalangan aparatur pemerintah masih perlu peningkatan dan pengembangan. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Pekanbaru sudah mulai melakukan upaya positif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) yang melayani masyarakat dan dunia usaha secara profesional, meskipun masih perlu terus peningkatan.
3. Masih kurangnya koordinasi dan kerjasama antar penegak hukum seperti Kepolisian Negara, Satuan Polisi Pamong Praja, Kejaksaan, Aparatur Daerah, Aparatur Pusat dan Masyarakat dalam membangun kota yang aman, tertib dan harmonis.
4. Peranan pemerintah dalam rangka penegakan hukum khususnya dalam hukum administrasi negara merupakan kombinasi dari peran pengaturan, pengawasan atas pelaksanaan peraturan dan sekaligus dapat menyelesaikan pelanggaran peraturan. Konsep reward and punishment belum dijalankan secara optimal untuk mendukung terciptanya good governance.
5. Usaha untuk menghapus praktek penyelenggaraan negara yang bernuansa KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) sudah mulai dijalankan meski belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Di lain pihak, lahirnya kepemimpinan di tingkat nasional dan di tingkat daerah melalui proses yang demokratis membuka kemungkinan untuk lahirnya pimpinan pemerintahan yang memiliki komitmen tinggi terhadap hukum.
6. Penerapan E-government dengan menggunakan teknologi informasi masih terbatas digunakan. Kemampuan SDM dalam menjalankan sistem ini masih sangat terbatas. Persepsi Pejabat publik terhadap e-government masih terbatas pada jaringan internet dan LAN, belum

berorientasi pada paperless administration. Padahal e-government diyakini dan terbukti mampu untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, penganggaran yang efektif, penentuan prioritas yang tepat, dan transparansi anggaran. Selain itu, presisi data dan kemudahan dalam perencanaan akan diperoleh jika teknologi informasi bisa diterapkan.

### **2.1.7. Pendidikan.**

1. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, salah satunya ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Pada tahun 2005 jumlah sekolah tercatat TK 101 unit, SD 241 unit, MI 13 unit, SMP 61 unit, MTs 20 unit, SMA 33 unit dan SMK 32 unit, MA 13 unit, Akademi 22 unit dan Perguruan Tinggi 18 unit (13 Sekolah Tinggi, 5 Universitas). Peningkatan jumlah institusi pendidikan ini di satu sisi menggembirakan, tetapi di sisi lain, kualitas yang dihasilkan dari proses pendidikan tidak kalah pentingnya. Pasar bebas, AFTA, dan globalisasi bila tidak diimbangi dengan penguasaan kompetensi SDM, menjadikan daya saing tenaga kerja menjadi rendah sehingga tidak bisa bersaing dengan tenaga kerja asing. Jika ini tidak dipersiapkan dengan cermat dikhawatirkan, tenaga kerja dari penduduk Pekanbaru akan menjadi penonton di negeri sendiri.
2. Pendidikan masih menjadi barang mahal dan belum semua terjangkau oleh masyarakat miskin. Kesenjangan perolehan pelayanan pendidikan antara penduduk miskin dan kaya, pusat kota dan pinggiran menjadi masalah. Kemudahan akses, terjangkaunya biaya, dan kualitas pendidikan yang didapatkan adalah permasalahan dunia pendidikan. Usaha untuk menyediakan sekolah/ madrasah murah baik dari komponen uang sekolah, pakaian, transportasi, buku, alat tulis, serta biaya tambahan lainnya jika tidak bisa dicarikan solusinya akan menyebabkan sebagian masyarakat yang penghasilannya rendah tidak akan bisa mengenyam pendidikan.
3. Perhatian pemerintah terhadap institusi pendidikan swasta masih kurang, bila dibandingkan dengan perhatian yang diberikan pada

institusi pendidikan negeri yang dibantu sepenuhnya. Padahal disisi lain, pemerintah tidak sanggup menyediakan semua kebutuhan dan sarana pendidikan negeri untuk masyarakat umum. Tingginya biaya penyelenggaraan pada sekolah swasta menyebabkan hanya kalangan tertentu saja yang bisa memasuki sekolah swasta. Padahal, banyak juga kalangan masyarakat umum yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri tetapi juga tidak memiliki biaya yang cukup untuk masuk sekolah swasta.

4. Pendidikan informal dan non formal di tengah masyarakat yang turut membantu mencerdaskan masyarakat berupa kursus, pelatihan, dan bentuk lainnya tumbuh subur. Peranan pembinaan, pengawasan, dan bantuan dari pemerintah daerah masih harus terus ditingkatkan untuk bisa bersinergi dengan lembaga pendidikan formal yang telah ada.
5. Kurikulum pendidikan untuk tenaga terampil. Penguasaan teknologi informasi dan bahasa asing akan menjadi semakin penting di masa depan. Ketersediaan laboratorium, perpustakaan, alat peraga, kurikulum, dan sarana penunjang pendidikan lainnya yang memadai, akan mampu meningkatkan penguasaan ilmu dan teknologi yang sejalan dengan perkembangan zaman. Pendidikan keterampilan, teknologi, dan ilmu-ilmu terapan, memberi peluang lebih besar bagi peserta didik untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Jika ini tidak mendapat prioritas maka dikhawatirkan, lulusan pendidikan sekolah menengah jika tidak melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi akan menjadi pengangguran di masa depan.
6. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang merupakan pendidikan awal yang diterima seorang anak yang meliputi playgroup dan taman kanak-kanak berkembang cukup pesat di Pekanbaru. Pendidikan awal yang perannya sangat besar ini masih perlu perhatian yang lebih besar dari semua kalangan.
7. Pendidikan yang bisa menciptakan perilaku peserta didik yang memiliki akhlak baik dan dibekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

bermanfaat tidak sepenuhnya bisa didapatkan. Kenakalan remaja, tawuran, rendahnya etika dan sopan santun, dan praktek tercela lainnya yang dilakukan oleh siswa sekolah dasar dan menengah menjadi permasalahan untuk disikapi dunia pendidikan.

8. Pekanbaru sebagai ibukota Propinsi Riau akan menjadi barometer pendidikan di Riau. Di samping memenuhi kebutuhan untuk warganya, pendidikan di Pekanbaru juga melayani kebutuhan pendidikan dari daerah-daerah lain di luar Pekanbaru. Karena itu, pembangunan pendidikan di Pekanbaru menjadi sangat penting dan menentukan kualitas pendidikan di Riau pada umumnya.

### **2.1.8. Hukum dan Kamtibmas.**

1. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Pekanbaru memerlukan lebih banyak perhatian karena terdapat kecenderungan kenaikan kualitas dan kuantitas pelaku kejahatan baik kejahatan konvensional maupun kejahatan yang terorganisir. Berbagai jenis kejahatan yang memerlukan perhatian adalah perampokan, pembunuhan, pencurian kendaraan bermotor, perbuatan sodomi terhadap anak-anak disertai pembunuhan, dan pelacuran. Kejahatan yang terorganisir meliputi kejahatan /tindak pidana korupsi, kejahatan perjudian, kejahatan lingkungan, perdagangan wanita dan anak-anak/bayi, perdagangan narkoba dan zat adiktif dan kejahatan melalui iptek.
2. Sosialisasi beragam produk hukum ke tengah-tengah masyarakat terus menerus dilakukan. Jangkauan program sosialisasi memang masih terbatas dan oleh karenanya dari tahun ke tahun harus tetap dilakukan. Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, dampak kejahatan perjudian terhadap keutuhan rumah tangga, dan produk hukum lainnya telah banyak dilakukan.
3. Era demokratisasi sebagai hasil dari gerakan reformasi, membuka peluang partisipasi publik dan rakyat banyak dalam melakukan pengawasan atas semua kebijakan publik dan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Adanya sejumlah undang-undang yang membuka akses publik pada proses pembuatan produk hukum dan keterbukaan dalam penyelenggaraan

pemerintahan, merupakan peluang yang amat besar bagi lahirnya pemerintahan yang mematuhi dan menghormati hukum. Tuntutan masyarakat bagi terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa akan menjadi pendorong bagi semua jajaran penegak hukum dan penyelenggara pemerintahan untuk senantiasa konsisten pada penghormatan terhadap hukum. Kondisi masyarakat kota Pekanbaru yang dinamis dan metropolis, dimana sikap masyarakat terhadap hukum dan penegakannya telah semakin baik.

4. Pemerataan pendapatan yang belum memenuhi harapan akan mengakibatkan terbatasnya kesempatan bekerja bagi angkatan kerja yang jumlahnya setiap tahun senantiasa bertambah. Keadaan yang demikian ini menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat.
5. Komitmen penegakan hukum yang dipunyai oleh aparat penegak hukum Keterbatasan fasilitas penunjang dan tingkat kesejahteraan aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat yang belum memadai menimbulkan sifat pragmatis yang mementingkan keuntungan jangka pendek.

### **2.1.9. Kehidupan Beragama.**

1. Semangat kehidupan beragama di Pekanbaru cukup tinggi. Pembangunan fasilitas keagamaan seperti rumah ibadah, madrasah dan sekolah sudah cukup baik. Jumlah masjid di Kota Pekanbaru pada tahun 2005 berjumlah 473 unit, surau 335, Mushalla 97, Gereja Katolik 12, Gereja Protestan 49, Pura Hindu 2, dan Vihara Budha 11, dan klenteng 1 unit. Selain itu, terdapat 425 majelis taklim, 781 orang muballigh, 13 pondok pesantren, 209 unit Madrasah Diniyyah Awaliyyah, 13 Unit Madrasah Ibtidaiyyahm 24 unit Madrasah Tsanawiyah, 13 unit Madrasah Aliyah dan 348 unit Taman Pendidikan Al-Quran. Jumlah jamaah haji tahun 2005/2005 sebanyak 1.608 orang jamaah. Perayaan hari besar agama mendapat perhatian yang besar dari pemerintah dan masyarakat. Iklim kehidupan beragama yang



kondusif di Pekanbaru merupakan modal yang besar untuk mensukseskan pembangunan yang dilakukan.

2. Toleransi antar umat beragama cukup tinggi. Tidak ada konflik yang berarti di tengah-tengah umat beragama.
3. Kecenderungan yang umum terjadi beriringan dengan kemajuan sebuah kota akibat kesibukan dan renggangnya ikatan sosial sehingga berkurangnya kebiasaan nasehat menasehati dalam agama, akan menyebabkan nilai-nilai agama dan penerapannya menjadi semakin lemah dan longgar.

## **2.2. Analisis Kondisi Umum Kota Pekanbaru.**

### **2.2.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup.**

1. Peluang untuk terjadi banjir di Pekanbaru di masa mendatang cukup besar. Pembangunan daerah permukiman, perdagangan, perkantoran, dan industri akan mengurangi daerah resapan air sehingga aliran permukaan (*run off*) akan menjadi lebih besar.
2. Kebutuhan air bersih semakin besar. Diprediksi masyarakat akan semakin banyak memanfaatkan air tanah (dangkal dan dalam) dengan pengeboran masing-masing secara langsung. Pengawasan dan pengaturan yang kurang baik akan menyebabkan keseimbangan air tanah terganggu.
3. Secara geografis, Pekanbaru akan menjadi semakin strategis karena letaknya di tengah perlintasan kabupaten/kota di Riau. Perkembangan kabupaten/kota di sekitarnya akan juga turut meningkatkan percepatan pembangunan di Pekanbaru. Sektor pelayanan dan jasa persinggahan akan semakin berkembang dan prospektif.
4. Penataan ruang akan semakin kompleks karena kegiatan pembangunan yang pesat dan kepentingan yang tumpang tindih.
5. Persoalan pencemaran sungai Siak, erosi tebing, dan pemanfaatan air Sungai Siak akan menjadi masalah jika tidak dilakukan pengaturan yang baik. Pengalihan kawasan pabrik/ industri di pinggiran sungai siak, kewilayah kawasan industri pembangunan Turap/ penyangga pinggiran

sungai Siak dan jalan inspeksi, serta pengembangan pinggiran sungai Siak untuk menjadi kawasan wisata kota.

6. Kebutuhan akan taman kota dan ruang terbuka hijau yang representatif semakin tinggi untuk sarana rekreasi dan hiburan bagi warga kota. Harga tanah yang semakin mahal di tempat yang strategis akan menjadi masalah untuk pengadaan taman kota. Penataan kawasan taman hutan, di beberapa titik wilayah pinggiran.
7. Produksi sampah dan limbah yang semakin besar menuntut pengelolaan yang lebih profesional. Pengelolaan sampah secara tradisional dan manual tidak lagi bisa diandalkan di masa depan untuk daerah perkotaan. Pemanfaatan hasil pengelolaan sampah organik/nonorganik satu penerimaan daerah dengan inovasi diolah menjadi pupuk kompos atau Pembangkit listrik alternatif dari gas etanol yang dihasilkan dari pengembangan pengolahan sampah untuk sendiri.
8. Polusi udara akibat kendaraan bermotor, asap kebakaran hutan/lahan, dan pabrik karet akan berpotensi membesar seiring dengan meningkatnya kegiatan perekonomian dan pembangunan dan bertambahnya jumlah warga.
9. Penumpukan kegiatan perekonomian di pusat kota akan menambah kemacetan dan keruwetan di pusat kota jika penyebaran pusat kegiatan tidak disebar dan dirangsang untuk dilakukan di daerah pinggiran. Berkembangnya daerah luar Pekanbaru yang berbatasan dengan Kota Pekanbaru seperti Rimbo Panjang dan Siak Hulu (Kampar), Sikijang Mati (Pelalawan), dan Minas (Siak) merupakan fenomena yang harus dihadapi di masa depan. Pengembangan akses jalan serta jembatan dari daerah kota kewilayah Rumbai dan Rumbai Pesisir.

### **2.2.2. Demografi.**

1. Dengan perkiraan pertumbuhan penduduk rata-rata 4,15% per tahun, maka jumlah penduduk Pekanbaru pada tahun 2025 diperkirakan menjadi 1.559.472 jiwa. Hal ini akan menimbulkan permasalahan perkotaan yang cukup kompleks seperti : persoalan ketenagakerjaan,

kriminalitas, sosial, dan penataan kota yang perlu diantisipasi dari sekarang.

2. Melihat kondisi yang ada saat ini kedepan sangat perlu diperhatikan kebutuhan sarana pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial lainnya yang cenderung semakin tinggi.
3. Meningkatnya angka pencari kerja dari tahun ke tahun sesuai dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang tersedia. Kedepan perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Pekanbaru dan perlu peningkatan kompetensi SDM tenaga kerja lokal untuk menghadapi globalisasi dan pasar bebas.
4. Untuk mengurangi angka pengangguran, maka perlu diambil langkah-langkah bijak di masa yang akan datang yakni dengan membuka lapangan pekerjaan dan mempersiapkan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
5. Untuk mengatasi permasalahan kependudukan yang muncul perlu dibangun suatu sistem informasi kependudukan yang baik, yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas sehingga dapat menyajikan data kependudukan yang up to date serta dapat dipertanggungjawabkan.
6. Konsentrasi penduduk dan kegiatan perekonomian di pusat kota dengan segala fasilitasnya akan membuat ketidaknyamanan di pusat kota. Jika tidak ada usaha untuk mengarahkan pembangunan sesuai dengan Wilayah Pembangunan (WP) yang ada, maka persoalan besar seperti kemacetan dan kesemrawutan akan terjadi di tengah kota. Pengembangan pembangunan kota kedepan berpedoman kepada pembagian Wilayah Pembangunan (WP) yang telah disepakati bertujuan agar pembangunan dapat berjalan merata di setiap Kecamatan.

### **2.2.3. Perekonomian dan Sumber Daya Alam.**

1. Konversi lahan hutan, pertanian, dan rawa menjadi daerah pemukiman, industri, dan kegiatan perdagangan biasanya terjadi di kota besar, seperti halnya juga Pekanbaru. Pendirian mall, ruko, kompleks perkantoran akan mengincar daerah-daerah strategis meskipun belum tentu benar peruntukannya di tata ruang kota. Pengawasan pendirian bangunan dan peruntukan lahan akan memiliki peran sangat strategis dalam penataan kota.
2. Institusi perekonomian seperti koperasi, perusahaan, perbankan, UMKM akan tumbuh subur seiring dengan majunya perekonomian kota. Pembinaan, pengawasan, dan pengaturan oleh pemerintah untuk menstimulasi kegiatan perdagangan yang memberi manfaat besar bagi pemerintah dan warga kota menjadi sangat penting dilakukan.
3. Dimasa mendatang direncanakan akan dibangun pasar tradisional modern di setiap kecamatan. Hal ini untuk mengantisipasi berdirinya pasar-pasar modern yang dikelola oleh pihak swasta. Dan bertujuan untuk menampung pedagang yang makin banyak termasuk pedagang kaki lima.
4. Produksi pertanian, perikanan, dan peternakan di daerah perkotaan biasanya memiliki kecenderungan menurun seiring dengan konversi lahan dan kegiatan perekonomian ke arah usaha jasa dan pelayanan. Strategi untuk mengembangkan usaha yang hightech dan efisien di lingkungan perkotaan menjadi hal yang utama. Kerjasama yang saling menguntungkan dengan daerah hinterland di luar Pekanbaru di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan adalah salah satu pilihan yang bisa dilakukan. Walaupun kota pekanbaru bukanlah area pertanian namun beberapa sektor masih sangat mungkin dikembangkan seperti subsektor hortikultura dan perikanan.
5. Penduduk miskin kota dalam jumlah absolut memiliki kecenderungan bertambah, meskipun secara persentase biasanya cenderung tetap atau turun sedikit, tetapi tidak signifikan. Kemiskinan kota tetap menjadi

masalah di masa depan. Sesuai dengan tingkat perkembangan Kota Pekanbaru yang sangat dinamis, maka masalah kemiskinan akan selalu mengikutinya apabila tidak ada langkah-langkah yang kongkrit untuk mengantisipasinya, terutama dalam hal pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh karena faktor migrasi, memperluas kesempatan kerja, menciptakan kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan politik yang dinamis agar lebih memungkinkan untuk semakin berkembangnya Kota Pekanbaru sesuai dengan kapasitas dan dukungan potensi yang ada. Program penanggulangan kemiskinan akan terus dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang telah ditetapkan.

6. Pendapatan daerah dari bagi hasil minyak bumi akan cenderung terus menurun seiring dengan menurunnya produksi minyak di Riau. Menurut perhitungan dalam kurun 20 tahun lagi, minyak bumi di Riau sudah tidak ekonomis lagi untuk diproduksi. Karena itu perlu usaha untuk mengembangkan pendapatan dari sektor lain selain dari bagi hasil minyak bumi dengan meningkatkan pendapatan asli daerah. Tetapi pendapatan daerah dari kegiatan perdagangan dan jasa akan terus meningkat. Kemampuan daerah untuk menstimulasi kegiatan perdagangan, industri dan jasa yang memberikan keuntungan pada masyarakat dan pendapatan daerah sangat penting artinya. Melihat dari dinamika perkembangan Kota Pekanbaru yang semakin maju dan berkembang membawa konsekwensi logis berupa semakin besarnya pengeluaran pembiayaan oleh pemerintah kota, baik untuk belanja aparatur maupun untuk belanja publik. Mengingat bahwa upaya untuk memperbesar pendapatan daerah bukan merupakan hal yang mudah, maka untuk pemanfaatan pendapatan yang ada pemerintah kota harus berupaya untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan penggunaan belanja yang telah dilokasikan pada APBD melalui penyusunan rencana belanja daerah yang lebih realistis.
7. Pertumbuhan sektor perdagangan yang semakin pesat di Pekanbaru juga termasuk di sektor industri, sektor industri kecil pengolahan

memiliki peran cukup penting dan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Pekanbaru. Oleh karena itu industri kecil pengolahan menjadi sangat strategis dan perlu perhatian dimasa mendatang. Maraknya produk impor dari luar negeri (pasar bebas) berbagai sektor menghendaki perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing produk lokal dari institusi yang berkepentingan serta pengawasan terhadap barang-barang impor.

8. Sebagai daerah yang sedang mengalami perkembangan yang pesat, maka pengaturan (regulasi) terhadap sektor industri dan sektor perdagangan harus jelas, nyata dan transparan. Untuk itu penentuan tempat/kawasan bongkar muat, pergudangan, pengolahan, pendistribusian, dan jalur lalu lintas yang memberi kemudahan aksesibilitas yang tidak mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi lainnya harus sudah menjadi skala prioritas dalam pengambilan kebijakan. Semakin tingginya intensitas kegiatan industri dan perdagangan di Kota Pekanbaru diprediksi masih akan mengalami peningkatan pada masa mendatang. Pengembangan daerah kawasan khusus industri seperti di Kawasan Industri Tenayan sangat potensial untuk dikembangkan dan memerlukan Badan Pengelola Kawasan serta institusi lainnya.
9. Peran perbankan didalam menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi akan semakin penting. Untuk itu diperlukan peran pemerintah dalam pengaturan dan regulasi yang memudahkan akses permodalan ke perbankan.
10. Dengan asumsi bahwa apabila tidak ada upaya-upaya yang maksimal dan terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dan para pengusaha yang mengelola kegiatan kepariwisataan baik yang merupakan pengelola objek wisata ataupun jasa wisata lainnya, maka perkembangan kepariwisataan di Kota Pekanbaru pada masa mendatang tidak akan terjadi perubahan-perubahan yang signifikan. Namun demikian apabila melihat potensi yang telah tersedia, prospek

perkembangan industri pariwisata Kota Pekanbaru lebih berpotensi ke arah *MICE Industry*.

#### **2.2.4. Sosial, Budaya dan Politik.**

1. Penyebaran fasilitas kesehatan di luar pusat kota yang mudah terjangkau dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat akan semakin dibutuhkan di masa depan, yang diikuti dengan penyebaran tenaga medis dan paramedis secara merata di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di kota Pekanbaru dan menjangkau sampai ke daerah pinggiran.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka menghadapi globalisasi dan pasar bebas sangat perlu diperhatikan pada masa mendatang, sehingga kita mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha asing yang masuk ke kota Pekanbaru dalam memberikan pelayanan kesehatan.
3. Meningkatnya penderita penyakit menular seperti DBD, HIV-AIDS, penyakit ISPA, serta penyakit yang bersumber dari lingkungan kumuh yang memiliki kecenderungan besar di daerah perkotaan, termasuk di Pekanbaru. Akreditasi institusi kesehatan, sertifikasi tenaga medis dan paramedis serta penerapan sistem kesehatan Kota Pekanbaru sangat penting untuk ditingkatkan di masa yang akan datang.
4. Kedepan dengan semakin tinggi penderita penyakit stroke, kelumpuhan, kanker dan kemunduran fisik perlu dibangun fasilitas fisioterapi sebagai sarana pelayanan bagi penyakit tersebut.
5. Perilaku hidup bersih dan sehat harus tetap dipromosikan dan advokasi agar dapat tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Disamping itu, kebutuhan masyarakat akan aktivitas olahraga untuk mengimbangi semakin berkurangnya aktivitas fisik dalam kehidupan karena semakin berkembangnya teknologi perlu menjadi pemikiran Pemerintah Kota untuk ke depan. Disamping itu juga sangat dibutuhkan pengembangan kebersihan lingkungan.

6. Kehidupan kota besar menuju kota metropolis bisa menyebabkan ikatan sosial menjadi renggang. Karena itu rekayasa sosial di masa depan diperlukan agar interaksi sosial antar warga tumbuh dan berkembang. Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, maka interaksi sosial akan menumbuhkan sikap-sikap positif berupa kesetiakawanan, saling membantu, gotong royong, dan peduli. Media seperti olahraga bersama, arisan, pengajian, rekreasi, taman tempat bersantai dan berkumpul adalah kebutuhan masa depan yang semakin diperlukan. Untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan saling toleransi dalam pelaksanaan pembangunan kota dengan tingkat heterogenitas yang sangat tinggi.
7. Sangat dibutuhkan tenaga medis dan paramedis yang profesional dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat baik di puskesmas maupun puskesmas pembantu serta ke depan pelayanan kesehatan di puskesmas dilengkapi dengan tenaga dokter spesialis.
8. Dalam pelaksanaan pembangunan sarana kesehatan ke depan harus memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lingkungan setempat sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan yang justru sangat membahayakan kesehatan masyarakat, serta harus memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (green city).
9. Kemajuan pembangunan kota, urbanisasi, dan heterogenitas akan juga meningkatkan permasalahan sosial, tunawisma, pengemis dan kriminalitas. Untuk itu, kedepan hal ini menjadi perhatian pemerintah kota Pekanbaru.
10. Kota Pekanbaru yang masyarakatnya sangat heterogen yang terdiri dari berbagai suku yang menciptakan kondisi pluralisme dengan interaksi yang sangat dinamis. Hal ini perlu menjadi perhatian agar heterogenitas tersebut dapat menjadi modal sosial dalam pembangunan.
11. Perlu pengembangan budaya Melayu dalam pelaksanaan pembangunan di kota Pekanbaru, sehingga secara fisik dan non fisik (normatif) Kota Pekanbaru dapat mencerminkan budaya Melayu.



12. Pada masa depan sangat diperlukan melibatkan lembaga yang representatif dalam melakukan kegiatan pengembangan dan pelestarian budaya Melayu, karena dalam era globalisasi sangat besar pengaruh budaya asing yang masuk ke kota Pekanbaru yang tidak sesuai dengan budaya kita. Untuk itu, ke depan perlu kita kembangkan lebih besar nilai-nilai budaya Melayu dan memproteksi sekuat mungkin budaya atau norma-norma yang tidak sesuai bertentangan dengan nilai budaya Melayu, mengingat sifat Budaya Melayu cukup toleran dan terbuka terhadap budaya asing sangat mendukung di masa depan untuk bisa bersama-sama membangun kota ditengah heterogenitas budaya.
13. Masih tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan fasilitas pariwisata, maka kedepan perlu digali potensi wisata yang ada di kota Pekanbaru baik wisata alam, kuliner, religius atau belanja agar sektor pariwisata dapat dikembangkan dengan baik.
14. Perlu peningkatan kerjasama penanganan masalah sosial Pemerintah Kota Pekanbaru dengan wilayah hinterland yang berkaitan dengan permasalahan sosial yang berkembang.
15. Sikap saling pengertian dan saling memahami diupayakan terus dikembangkan baik oleh pemerintah kota, maupun Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Adat, dan tokoh masyarakat.
16. Sebagai akibat dari reformasi adalah semakin terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pikiran baik lisan maupun tulisan. Penyampaian pendapat yang terbuka tidak lagi harus dibayangi oleh kontrol yang ketat dari negara. Kebebasan menyampaikan dan berbeda pendapat, serta kebebasan pers berlangsung semakin dewasa dengan memperhatikan keseimbangan aspek kepentingan individual dengan kepentingan umum/ masyarakat secara keseluruhan. Namun tetap mengacu kepada norma-norma yang berlaku sehingga tidak terjadi hal-hal yang justru berdampak negatif bagi individu, kelompok dan masyarakat.
17. Berbagai gejolak globalisasi yang serba cepat dapat mempengaruhi suasana stabilitas sosial. Selain itu, kemenangan suatu paham atau

ideologi di dunia internasional dapat mendorong bagi bangkitnya ideologi serupa di arena politik dalam negeri oleh sebab itu berbagai pengaruh globalisasi tersebut perlu diwaspadai di masa depan.

18. Terwujudnya pemahaman yang sama bagi kekuatan politik, kekuatan masyarakat terhadap paham demokrasi dan paham konstitusionalisme untuk menjunjung tinggi hukum, dan hak asasi manusia merupakan pilar utamanya. Masyarakat kota yang plural memberikan dorongan bagi lahirnya kondisi berkompetisi sesama anggota masyarakat dalam mencapai kemajuan bersama.
19. Dalam banyak hal LSM telah dapat memberikan pencerahan dalam ikut serta memajukan kehidupan warga Kota Pekanbaru, maka dibutuhkan regulasi, pengawasan dan sinergisme dengan kepentingan masyarakat. Selain itu peran LSM diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **2.2.5. Sarana dan Prasarana.**

1. Ruas jalan yang lebar serta penambahan Jaringan jalan kota Pekanbaru Ini akan menjadi masalah dikemudian hari ketika pembangunan dan pemukiman sudah semakin berkembang, yang membutuhkan akses jalan yang lebih lebar. Untuk itu kebutuhan jalan yang lebar dengan kapasitas besar mejangkau berbagai wilayah kota yang mampu mendukung kelancaran arus dan volume lalu lintas yang besar menjadi prioritas. Pengawasan, Pemeliharaan dan peningkatan jalan di dalam Kota pekanbaru yang kualitasnya sangat memprihatinkan perlu perhatian besar. Jaringan jalan yang terputus-putus, jalan arteri, jalan primer, jalan skunder, jalan kolektor dan jalan lingkungan serta jembatan. Penambahan jaringan jalan sebagai akibat tututan perkembangan kota serta pembangunan jalan layang (Fly over) pada kawasan-kawasan tertentu, guna mengantisipasi kemacetan sebagai akibat pertambahan jumlah kendaraan. Selain itu tersedianya jalan lingkaran luar (Outer Ringroad) yang mengelilingi Kota Pekanbaru dengan

tujuan menyediakan sarana untuk kendaraan bertonase tinggi agar tidak masuk ke dalam kota, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan kerusakan jalan dalam kota Pekanbaru.

2. Penanganan sistem transportasi massal yang nyaman, cepat, efisien (representatif) yang bisa mengangkut penumpang dalam jumlah besar, sangat diperlukan. Transportasi massal yang baik akan mengurangi lalu lintas kendaraan pribadi yang dominan di dalam kota yang biasanya memicu kemacetan. Trend kota besar yang gagal dalam menyiapkan sarana dan prasarana massal bagi warga kota bisa saja terjadi di Pekanbaru jika tidak direncanakan dengan baik. Untuk itu diperlukan Transportasi massal yang sudah menggunakan jalur tersendiri yang dirancang sesuai dengan alur lalu-lintas/trayek serta memenuhi unsur-unsur transportasi massal yang nyaman yaitu cepat, efisien, efektif yang dibutuhkan masyarakat kota-kota besar khususnya kota Pekanbaru yang diikuti dengan regulasi izin trayek sesuai kebutuhan.
3. Perlu segera pembangunan jembatan baru untuk menghubungkan antara sisi utara dan sisi selatan Kota Pekanbaru untuk mengantisipasi padatnya arus lalu lintas dan kondisi konstruksi jembatan Siak I yang sudah sangat menurun dikarenakan umur konstruksi.
4. Terminal AKAP dipindahkan ke lokasi yang baru ke kawasan pengembangan kota yang direncanakan, sesuai dengan rencana tata ruang kota (Bandaraya Payung Sekaki), sehingga permasalahan kemacetan di Jalan Tuanku Tambusai diharapkan bisa dipecahkan. Kondisi ini dapat mengakibatkan pertumbuhan kawasan-kawasan baru yang berimplikasi pada peningkatan ekonomi perkotaan, khususnya Kota Pekanbaru. Terminal AKAP ini berpotensi untuk memenuhi kebutuhan akan terminal angkutan penumpang antar kota antar propinsi, antar kota dalam propinsi. Selain itu diharapkan tersedianya Terminal Barang yang dibangun di luar kawasan kota yang terintegrasi dengan jalan lingkar (Outer Ring road). Dengan demikian dapat membatasi masuknya kendaraan bertonase besar masuk ke dalam kota.

5. Untuk masa yang akan datang perlu peningkatan prasarana dan sarana dermaga penumpang di Sungai Duku. Untuk pelabuhan barang yang tersebar di sepanjang Sungai Siak harus ditertibkan dan ditingkatkan untuk kenyamanan dan keamanan arus lalu lintas kapal yang terpusat pada satu kawasan pelabuhan KIT.
6. Untuk saat sekarang kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II pada radius kawasan bandara, perkembangannya cukup pesat dimana berkembangnya kawasan-kawasan permukiman oleh pengembang (developer) atau pun masyarakat secara sendiri-sendiri. Untuk mengantisipasi perkembangan kota dan kebutuhan 20 tahun mendatang, perlu difikirkan untuk pengembangan/ pemindahan bandara Sultan Syarif Kasim II lebih representatif dan memenuhi persyaratan penerbangan.
7. Kondisi parkir di beberapa tempat sudah tertata, sehingga mengurangi kesan kesemrawutan Kota Pekanbaru. Pengawasan dalam persyaratan luas parkir untuk setiap pembangunan gedung baru akan terus menjadi perhatian sebagai upaya pengendalian pemerintah kota. Penataan parkir di masa depan dengan menggunakan meteran parkir, pengawasan parkir, serta pembangunan gedung parkir.
8. Ancaman banjir akan selalu terjadi jika pembangunan sistem drainase yang komprehensif dan pemeliharaan sungai tidak menjadi prioritas, dan bahkan bisa terjadi dalam taraf yang lebih parah. Pesatnya pembangunan di Pekanbaru membuat penanganan drainase harus dilakukan lebih serius. Jika tidak, maka problem banjir karena tidak tersalurnya air dari daerah rawan banjir dipermukiman dan daerah perdagangan menuju anak sungai dan sungai akan lebih parah. Sesuai dengan perkembangan kota Pekanbaru, seiring bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah jaringan jalan, maka sistem pembangunan jaringan drainase disejalkan dengan pembangunan jaringan jalan, dan terintegrasi dengan aliran sungai-sungai dalam kota sebagai saluran primer serta rencana perkembangan Kota.

9. Pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan kegiatan perindustrian dan perdagangan akan meningkatkan penggunaan listrik di masa depan. Kemajuan teknologi dengan peralatan yang banyak menggunakan tenaga listrik menyebabkan pemenuhan energi listrik sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan. Keterbatasan pemerintah (Pusat) dalam menyediakan energi listrik dan di tengah krisis ekonomi harus diantisipasi pemerintah daerah sedini mungkin supaya pembangunan, kegiatan masyarakat, industri dan perdagangan tidak terhambat oleh keterbatasan daya listrik. Jadi untuk ketersediaan energi listrik harus mencukupi, bahkan harus melebihi kebutuhan yang seharusnya, untuk mengantisipasi kelebihan pemakaian sesuai dengan pertambahan jumlah penduduk serta perkembangan industri di Kota Pekanbaru.
10. Penggunaan radio dan televisi sebagai sarana informasi, komunikasi dan hiburan semakin signifikan. Tumpang tindih frekuensi akan merupakan potensi permasalahan di masa datang jika tidak dilakukan pengaturan. Pengawasan frekuensi bagi media massa dalam menyuguhkan aneka informasi dan hiburan yang menjangkau masyarakat luas sangat urgen untuk dilakukan pengaturan. Kecenderungan informasi yang hampir tidak memiliki batas harus diantisipasi untuk menghindari dampak buruk dari media komunikasi ini.
11. Kebutuhan akan rumah terus meningkat sesuai dengan pertambahan jumlah penduduk. Hal ini berimplikasi semakin berkembangnya usaha property oleh pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang perumahan ataupun pembangunan yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Dalam hal ini peran pemerintah kota adalah membuat regulasi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan perkembangan kota ke depannya serta meningkatkan pengawasan sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sesuai dengan arahan tata ruang kota.
12. Kebutuhan akan air bersih di kota Pekanbaru semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan

industri, jasa dan perdagangan serta terminal dan pelabuhan yang senantiasa membutuhkan ketersediaan air bersih yang merupakan kebutuhan dasar. Untuk itu pelayanan dibidang air bersih, dilakukan dengan peningkatan investasi dan pembenahan manajemen Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pekanbaru, terus dilakukan. Hal ini selain masalah pemenuhan kebutuhan, juga untuk mengimbangi pemanfaatan sumberdaya air tanah oleh masyarakat melalui pembuatan sumur bor. Kebutuhan air bersih yang sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat akan terus meningkat seiring pertumbuhan kota. Selain itu, Penataan sumberdaya air tanah dengan regulasi dan pengawasan sangat perlu untuk menjaga keseimbangan alam. Terobosan dalam penyediaan air bersih bagi warga diperlukan mengingat kapasitas penyediaan air bersih masih jauh dari kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya.

#### **2.2.6. Pemerintahan.**

1. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, maka kebutuhan akan struktur organisasi pemerintahan memerlukan evaluasi setiap tahunnya. Dengan kata lain akan terjadi perubahan berdasarkan evaluasi dan kebutuhan organisasi kedepan.
2. Prinsip good governance dan clean government yang menjalankan prinsip-prinsip efisien, efektif, akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab akan menjadi kenyataan. Kontrol dari masyarakat dan lembaga legislatif akan mempercepat terwujudnya pelayanan publik prima melalui Penggunaan teknologi informasi dan wadah yang representatif.
3. Asas profesionalisme dan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, serta perlu peningkatan koordinasi antar instansi terkait.
4. Perlu peningkatan kesadaran dan kedisiplinan aparat pemerintah kota dalam penegakan hukum baik dalam bentuk penerapan konsep reward and punishment menuju terciptanya good governance.

5. Perlu keseriusan dalam mengimplementasikan Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) secara konsisten dan berkelanjutan yang diiringi dengan pengawasan yang ketat.
6. Mewujudkan e-government dan mengembangkan sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintah melalui ketersediaan prasarana dan sarana pengawasan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi diiringi dengan penganggaran, pengadaan dan sistem informasi teknologi yang diikuti oleh kualitas SDM yang memadai.

### **2.2.7. Pendidikan.**

1. SDM yang menguasai iptek dan bertaqwa sangat diperlukan dimasa depan. SDM yang ada juga dituntut untuk memiliki kemampuan yang kompetitif dan handal untuk bisa diterima di dunia kerja dan menciptakan lapangan kerja baru. Mental enterpreneurship (kewirausahaan) dengan nilai-nilai yang luhur diperlukan untuk bisa membawa kemajuan di tengah persaingan yang semakin ketat. Sistem pendidikan dituntut untuk mampu membaca situasi dan mempersiapkan SDM dalam menghadapi situasi yang penuh dengan kompetisi di segala bidang. Menyiapkan konsep pendidikan terpadu mulai tingkat SD, SMP, dan SMA.
2. Perdagangan bebas dan globalisasi bila tidak diimbangi dengan penguasaan kompetensi SDM, menjadikan daya saing tenaga kerja menjadi rendah sehingga tidak bisa bersaing dengan tenaga kerja asing. Jika ini tidak dipersiapkan dengan cermat dikhawatirkan, tenaga kerja dari penduduk Kota Pekanbaru akan menjadi penonton di negeri sendiri. Sehubungan dengan itu maka sampai tahun 2025 diupayakan wajib belajar 15 tahun atau peserta didik tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) dapat dituntaskan.
3. Institusi pendidikan swasta akan memegang peranan yang signifikan di masa datang karena keterbatasan pembiayaan yang diberikan oleh

pemerintah untuk membiaya semua sekolah negeri. Pembinaan dan bantuan yang proporsional yang diberikan oleh pemerintah terhadap sekolah swasta akan menjadi penentu bagi majunya pendidikan di kota Pekanbaru.

4. Peningkatan Sarana dan prasarana pendidikan yang lebih besar pada Sekolah Menengah kejuruan, yang mana nantinya siswa-siswa yang tamat dapat langsung beradaptasi dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.
5. Menggiatkan kegiatan keagamaan di sekolah-sekolah, guru meningkatkan akhlak dan kepribadian siswa agar tidak terpengaruh dari hal-hal negatif.
6. Perlunya penambahan baik sekolah baru maupun ruang kelas baru, di tingkat SD, SMP, SMA dan SMK, sehingga terdapat pemerataan pelayanan pendidikan.
7. Dengan tingginya angka pertumbuhan penduduk lebih kurang 3,2 % pertahunnya, maka sampai tahun 2015 diperlukan penambahan unit Sekolah Baru di Tingkat SD 100 unit, SMP 25 unit, SMA 15 unit dan SMK 13 unit.
8. Mengingat Status Rintisan sekolah Bersandar Internasional tahun 2005 belum terwujud, maka sampai tahun 2025 diupayakan terwujudnya SBI SD 6 unit, SMP 6 unit, SMA 6 unit dan SMK 6 unit serta Madrasah Alyah 2 unit, MTS 2 unit yang berarti setiap dua Kecamatan minimal masing-masing tingkat sekolah memiliki 2 unit SBI.
9. Dalam rangka peningkatan kualitas tenaga pendidik terutama guru, maka sampai tahun 2025 diupayakan semua guru disetiap tingkat telah berkualifikasi latar belakang pendidikan formal Strata Satu (S1) maupun yang sederajat. Disamping hal tersebut, diupayakan melaksanakan diklat profesional guru yang menekankan pada IT, pendalaman teknologi IPA, matematika, fisika dan sebagainya. Kemudian diupayakan peningkatan penguasaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta penguasaan Bahasa Inggris.



10. Perlunya penambahan sarana ruang dan peralatan laboratorium di sekolah. Khususnya pada sekolah-sekolah kejuruan guna meningkatkan skill anak didik dalam menghadapi dunia kerja nantinya. Menambah sekolah kejuruan dengan berbagai jurusan sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha yang ada di Kota Pekanbaru.
11. Pengembangan dan penguatan kelembagaan pendidikan non formal di lingkungan masyarakat guna menunjang peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, melalui pemanfaatan sistem informatika/ IT dalam sistem pembelajaran di sekolah serta perlunya peningkatan kemampuan, keterampilan dan kompetensi guru dalam melakukan proses pembelajaran di Sekolah.

#### **2.2.8. Hukum dan Kamtibmas.**

1. Perlu peningkatan dan pengawasan terhadap keamanan dan ketertiban melalui penegakan hukum (law enforcement).
2. Perlu diupayakan membangun karakter masyarakat serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya khususnya budaya melayu.
3. Tantangan yang ada disertai karakter kejahatan yang bersifat nasional dan bahkan international menjadikan program sosialisasi semakin penting untuk terus menerus dilaksanakan. Program pelaksanaan sosialisasi harus konsistens dilaksanakan oleh semua jajaran aparaturnegak hukum dengan menjunjung tinggi prinsip persamaan di depan hukum dan tidak diskriminatif, terjaminnya kepastian hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. Memperkecil kesenjangan pendapatan melalui penetapan kebijakan dan peningkatan kesadaran serta kedisiplinan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara, untuk terciptanya kemandirian dan ketertiban hidup bermasyarakat.
5. Pembaruan peraturan daerah akan dilakukan secara terus-menerus baik dengan (a) peninjauan kembali dan mengganti peraturan daerah yang tumpang tindih, berlawanan dengan undang-undang dan tidak

berpihak kepada kepentingan masyarakat; (b) perwujudan peraturan daerah yang berorientasi pada rasa keadilan dan mempertimbangkan otonomi daerah; (c) pengembangan komitmen dalam penegakan hukum melalui perjanjian kerjasama antarlembaga dengan memperhatikan produk hukum nasional dan internasional yang diratifikasi.

### **2.2.9. Kehidupan Beragama.**

1. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan untuk mendukung kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh masyarakat dan tokoh agama baik di masjid, madrasah, sekolah agama dan pusat kegiatan keagamaan lainnya. Pembinaan dan dukungan terhadap kegiatan yang dilakukan harus bisa mengimbangi pembangunan fisik yang telah dilakukan.
2. Potensi konflik di masa depan diperkirakan bisa saja terjadi karena lingkungan kota yang semakin heterogen dan nilai-nilai moral dan sosial masyarakat perkotaan yang semakin longgar. Karena itu pembinaan keagamaan di semua level masyarakat, baik di sekolah/madrasah, kaum perempuan, aparatur pemerintah, anak-anak, swasta, dan masyarakat umum harus terus diprogramkan dan didukung oleh pemerintah kota.
3. Kehidupan kota yang semakin kompleks dan pengaruh akibat globalisasi akan memberikan pengaruh baik positif maupun negatif terhadap kehidupan beragama. Meskipun pendidikan agama sudah diberikan di sekolah, penerapan nilai agama yang menjadi pelindung efektif terhadap pengaruh buruk perkembangan zaman harus mendapat perhatian utama di masa depan. Aspek pendidikan yang mengedepankan nilai dan moral agama harus diutamakan.
4. Penyakit masyarakat prostitusi, perjudian, minuman keras yang biasanya selalu mengiringi perkembangan kota harus mendapat perhatian. Pembinaan dan pendidikan agama di keluarga, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa dan orang tua harus terus digalakkan untuk mengantisipasi pengaruh negatif dari perkembangan yang ada.

5. Pemahaman umat beragama terhadap ajaran agama akan semakin baik, namun masih cukup banyak yang memahami ajaran agama hanya sebatas ajaran ritual sehingga agama belum bisa dijadikan pedoman dan kontrol terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

## BAB III

### VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2005-2025

#### 3.1. Visi

Berdasarkan kondisi masyarakat dan Kota Pekanbaru saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh Kota Pekanbaru, maka Visi Pembangunan Kota Pekanbaru 2005-2025 adalah :

**“Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan, serta pusat kebudayaan Melayu, menuju masyarakat sejahtera yang berlandaskan iman dan taqwa”.**

Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

#### **Pusat Perdagangan dan Jasa.**

Pusat perdagangan dan jasa mengandung pengertian bahwa Pekanbaru memiliki kegiatan perekonomian, perdagangan, dan jasa yang paling maju di Sumatera sehingga mampu menjadi pusat kegiatan. Karena itu, upaya untuk memajukan perekonomian, perdagangan dan jasa harus didukung dengan pelayanan prima pada masyarakat dan sektor swasta; memberdayakan kehidupan ekonomi masyarakat yang berbasis ekonomi kerakyatan; menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat; serta membangun sarana dan prasarana perkotaan.

#### **Pusat Pendidikan.**

Untuk menjadi pusat pendidikan, harus dilakukan upaya untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi menuntut sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing untuk bisa berperan di dalamnya. Kedudukan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau

menjadikan Pekanbaru sebagai acuan pendidikan di Riau, bahkan untuk mewujudkan Visi Riau 2020 peranan Pekanbaru sebagai pusat pendidikan menjadi lebih penting lagi.

### **Pusat Kebudayaan Melayu.**

Pusat Kebudayaan Melayu tercermin dari masyarakat yang berbudaya Melayu di mana Islam menjadi referensinya. Penerapan budaya Melayu di dalam segala aspek kehidupan, baik etika, estetika, ilmu pengetahuan, sastra, dan aspek lainnya menjadi sangat penting untuk menjadikan Pekanbaru sebagai pusat kebudayaan Melayu.

### **Masyarakat Sejahtera.**

Mewujudkan masyarakat yang sejahtera adalah cita-cita dari pembangunan. Pelaksanaan kegiatan pembangunan, aktivitas perekonomian, dan pendidikan ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat. Tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi pakaian, makanan, perumahan, dan kesehatan merupakan penentu kesejahteraan masyarakat. Selain itu, keserasian dengan lingkungan perkotaan yang terus berkembang turut mempengaruhi suasana kehidupan masyarakat, yaitu ketenangan, kedamaian, ketenteraman yang secara tidak langsung mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena itu, mewujudkan suasana kota Pekanbaru yang asri dengan taman kota, tempat rekreasi, dan rileks bagi warga kota serta lingkungan yang lestari dengan tingkat pencemaran yang terkontrol menjadi sangat penting.

### **Iman dan Taqwa.**

Visi kota sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan, serta pusat kebudayaan Melayu, menuju masyarakat sejahtera yang berlandaskan iman dan taqwa mengandung pengertian bahwa iman dan taqwa menjadi dasar dan ruh bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan yang merupakan nilai yang paling tinggi karena bersandarkan pada tanggung jawab pada Allah Yang Maha Kuasa. Karena

itu, penumbuhan masyarakat yang beriman dan bertaqwa mutlak dilakukan untuk mendukung pembangunan yang dilakukan.

### **3.2. Misi.**

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kota Pekanbaru 2005-2025, maka ditetapkan misi yang harus dilaksanakan, yaitu:

- a. Memajukan perekonomian, perdagangan dan jasa.
- b. Mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat.
- c. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
- d. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya Melayu.
- e. Mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
- f. Mewujudkan Pekanbaru asri dan lestari.
- g. Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa.

### **3.3. Arah Pembangunan Jangka Panjang Kota Pekanbaru Tahun 2005 -2025.**

#### **3.3.1. Sasaran Pokok.**

Sebagai ukuran terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan, serta pusat kebudayaan Melayu, menuju masyarakat sejahtera yang berlandaskan iman dan taqwa, maka pembangunan Kota Pekanbaru 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut.

**A. Memajukan perekonomian, perdagangan dan jasa,** yang ditandai oleh:

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi perkotaan yang berkesinambungan dan pemerataan kegiatan perekonomian.
2. Majunya sektor perdagangan dan jasa yang menjadi tulang punggung perekonomian perkotaan.

3. Meningkatnya produksi dan penghasilan masyarakat sebagai hasil dari iklim perekonomian kota yang kondusif.
4. Terwujudnya kekuatan perekonomian masyarakat yang berbasiskan pada ekonomi kerakyatan.
5. Meningkatnya pendapatan pemerintah daerah dari swasta dan masyarakat karena berkembangnya perekonomian.
6. Meningkatnya komoditas hasil pertanian dan budidaya pertanian sistim perkotaan.

**B. Mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat, yang ditandai oleh:**

1. Meningkatnya profesionalisme aparatur negara di Kota Pekanbaru untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, bebas KKN, berwibawa dan bertanggung jawab sehingga terwujud good governance dan clean government.
2. Terwujudnya pengurusan perizinan dan surat menyurat yang mudah efektif dan efisien.
3. Terbangun dan tersebarnya infrastruktur jalan, jembatan, drainase, jaringan air bersih, listrik, dan komunikasi yang handal dan merata untuk menunjang kegiatan dan kenyamanan warga kota Pekanbaru.
4. Tercapainya prioritas pembangunan sehingga pembangunan menjadi efektif, efisien dan tepat sasaran.
5. Terwujudnya kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik yang disertai partisipasi warga kota yang tinggi.
6. Terjaminnya keamanan warga kota dengan fokus utama pada aspek pencegahan dengan partisipasi dan tanggung jawab warga kota yang tinggi terhadap keamanan serta ketertiban yang ditandai dengan menurunnya angka kriminalitas.
7. Terwujudnya supremasi hukum yang konsisten, dan partisipasi warga dalam penerapannya.
8. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang paripurna dan profesional melalui pemberdayaan masyarakat.

**C. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing**, yang ditandai oleh:

1. Terwujudnya karakter bangsa, kemandirian dan kewirausahaan dimasyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas pendidikan dengan terpenuhinya standar nasional pendidikan diseluruh jenjang pendidikan.
3. Pemerataan kesempatan, akses, dan kemampuan mengikuti pendidikan formal pada semua lapisan masyarakat.
4. Terwujudnya pendidikan formal dan non formal serta informal di Pekanbaru yang mampu mempersiapkan SDM yang memiliki daya saing.
5. Terwujudnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja, kemandirian dan hubungan industrial yang harmonis, memberdayakan kelembagaan ketenagakerjaan dan sarana hubungan industrial serta perlindungan tenaga kerja menuju masyarakat sejahtera.
6. Terciptanya kader-kader pembangunan daerah yang handal, cekatan, cerdas, produktif dan profesional.
7. Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai kota layak anak.
8. Terwujudnya kesehatan holistik disetiap tingkat kehidupan pada warga masyarakat.

**D. Mewujudkan lingkungan dan masyarakat yang berbudaya Melayu**, yang ditandai oleh:

1. Penguatan lembaga yang mendukung pemantapan Budaya Melayu di Masyarakat.
2. Memasyarakatkan dan mengaplikasikan budaya Melayu di tengah masyarakat pada semua aspek.
3. Prinsip-prinsip dasar budaya Melayu yang bersendikan Islam menjadi panutan masyarakat.



4. Implementasi budaya Melayu dalam ; tunjuk ajar, perilaku, dan kearifan serta tata cara berpakaian melayu yang Islami diseluruh lapisan masyarakat.
5. Diterapkannya aspek estetika budaya Melayu dalam arsitektur dan taman kota yang menjadi ciri khas kota Pekanbaru dan membentuk karakter kota.
6. Terciptanya toleransi, kerjasama dan suasana mesra antar multikultur sehingga menjadi sinergi yang serasi untuk mendukung pembangunan.
7. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mengembangkan budaya Melayu.

**E. Mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera**, yang ditandai oleh:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara umum dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat serta membangun infrastruktur kesehatan khususnya pembangunan RSUD Kota Pekanbaru.
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara umum yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 80 di Kota Pekanbaru tahun 2025.
3. Tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 % pada tahun 2025.
4. Menurunnya angka kesenjangan kesejahteraan diseluruh lapisan masyarakat.

**F. Mewujudkan Pekanbaru asri, lestari dan bersih**, yang ditandai oleh:

1. Tertatanya ruang kota dan terciptanya sinergi antar wilayah sehingga kehidupan masyarakat menjadi nyaman.
2. Terjaganya kebersihan kota dan menurunnya tingkat polusi perkotaan ke ambang batas yang diizinkan.

3. Terwujudnya ruang terbuka hijau kota minimal 30 % dari luas kota dengan penyebaran yang merata.
4. Terwujudnya sarana rekreasi dan taman kota bagi masyarakat Kota Pekanbaru.
5. Terjaminnya sistem pengendalian dampak lingkungan sehingga pencemaran lingkungan akibat kegiatan perdagangan dan industri bisa ditekan hingga ke ambang batas yang diizinkan.
6. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, perilaku hidup bersih dan sehat serta pelestarian lingkungan hidup pada masyarakat untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan perkotaan.
7. Tertatanya pedagang kaki lima dan pedagang asongan sehingga tercipta lingkungan yang asri.

**G. Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, yang ditandai oleh:**

1. Terwujudnya pembangunan Islamic center di Kota Pekanbaru.
2. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga menjadi dasar utama pembangunan Kota Pekanbaru dalam mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya.
3. Terwujudnya nilai-nilai positif dan mulia dikalangan masyarakat dalam pengamalan ajaran agama, sehingga bisa menjadi nilai utama didalam kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia.
4. Terwujudnya pendidikan agama dan keagamaan pada setiap jenjang pendidikan mulai dari pendidikan Anak Usia Dini, dasar, menengah, dan tinggi.
5. Terwujudnya toleransi antar dan inter kehidupan umat beragama (antar umat beragama, sesama umat beragama) dan antara umat beragama dengan pemerintah, sehingga

menjadi modal yang kondusif dalam melaksanakan pembangunan di Kota Pekanbaru.

6. Terwujudnya perlindungan kepada masyarakat terhadap pendangkalan dan penodaan aqidah.

### **3.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pekanbaru.**

#### **A. Memajukan perekonomian masyarakat.**

Sektor-sektor perekonomian, khususnya perdagangan dan jasa adalah penggerak utama kehidupan perekonomian masyarakat perkotaan. Kemajuan sebuah kota juga harus didukung dengan perkembangan industri dan sektor-sektor lainnya, yang diarahkan pada :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat agar mampu memenuhi kehidupan yang layak.
2. Memperbaiki kualitas konsumsi masyarakat sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Memperlancar arus investasi yang dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.
4. Mendorong tabungan masyarakat untuk memperluas kesempatan investasi dan pembukaan lapangan usaha.
5. Meningkatkan daya saing produk-produk masyarakat Kota Pekanbaru untuk mengurangi ketergantungan pada produk inport.
6. Meningkatkan kerjasama perekonomian guna mendorong masuknya modal asing yang sejalan dengan kaidah budaya melayu.
7. Membangun Infrastruktur ekonomi yang memadai bagi terselenggarannya usaha ekonomi masyarakat, antara lain pembangunan pasar induk, terminal cargo, pelabuhan bongkar muat, sentra perdagangan dan World Trade Centre

(WTC) sebagai tempat pameran (Exhibition Hall), serta pengembangan kawasan industri di Kota Pekanbaru terutama Kawasan Industri Tenayan sebagai prioritas utama.

8. Pengembangan kelembagaan yang mendukung kemajuan ekonomi masyarakat, seperti kelembagaan Metrologi tingkat Kota Pekanbaru yang didukung dengan Sumber Daya Manusia yang terlatih dan professional.
9. Penegakan hukum dan regulasi yang tegas dalam dinamika perekonomian sehingga tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
10. Memperluas akses terhadap sumber permodalan meningkatkan kemampuan menyerap dan mengaplikasikan teknologi yang mampu menciptakan nilai tambah (*value added*), memperluas dan mengembangkan sistem informasi yang mampu diakses dengan mudah dan cepat oleh pelaku ekonomi.
11. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi yaitu dengan melakukan upaya pengembangan dan pemberdayaan ekonomi yang berbasis kerakyatan yang lebih kokoh melalui penyediaan fasilitas yang memadai, menumbuh-kembangkan aktivitas perekonomian yang berakar dari nilai-nilai dasar dalam kehidupan masyarakat yang cenderung heterogen namun tetap bercirikan Melayu, menumbuh kembangkan pasar-pasar tradisional yang berkualitas.

#### **B. Mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat.**

Pelayanan masyarakat yang prima akan mempercepat dalam mencapai kemajuan. Ketersediaan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial dan kenyamanan dalam beraktivitas akan meningkatkan kinerja dan produktivitas masyarakat.

1. Meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur pemerintah dengan melakukan penataan sistem kepegawaian yang meliputi sistem pengangkatan pegawai; penempatan yang sesuai dengan latar belakang dan kompetensi; kenaikan pangkat dan karir berdasarkan kinerja dan prestasi; pemberian penghargaan dan sanksi; pelatihan berkala dan on-job training; serta menciptakan iklim kerja yang kondusif.
2. Meningkatkan kualitas dalam melayani kebutuhan masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan menerapkan standar pelayanan minimum pada semua bidang. Termasuk di dalamnya pengurusan surat menyurat, perizinan, pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan umum.
3. Menata sistem administrasi dan manajemen pemerintahan dengan bertahap menggunakan sistem teknologi informasi (IT) dan sistem informasi geografis (GIS) yang efisien, efektif, dan akurat sehingga mempercepat pelayanan pada masyarakat serta peningkatan kinerja aparatur. Menerapkan transparansi dalam penganggaran, program berbasis kinerja, dan asas-asas manajemen modern untuk melancarkan pembangunan.
4. Dalam bidang kependudukan, pembangunan diarahkan kepada penerapan Sistem Informasi Kependudukan yang handal untuk membantu optimalisasi pelayanan publik ; membangun jaringan dan program aplikasi informasi kependudukan yang tersambung di setiap kecamatan sampai ke dinas terkait, sehingga duplikasi data penduduk dapat dihindari ; penerapan ketentuan peraturan daerah bagi pendatang untuk mengurangi dampak-dampak sosial pengangguran yang bersumber dari arus urbanisasi ; pengaturan kelahiran ; dan memperbaharui kebijakan kependudukan sesuai dengan perkembangan kota dan pembangunan.

5. Pembangunan sistem transportasi kota diarahkan untuk menata sistem jaringan jalan dan jembatan; penetapan ruas jalan yang sesuai dengan kriteria dan fungsi jalan (arteri, kolektor, dan lokal) dengan suatu tatanan transportasi perkotaan sebagai dasar dalam pembangunan wilayah perkotaan. Penyediaan lahan yang akan dijadikan ruas jalan perlu dilakukan untuk menghindari harga tanah yang semakin mahal dan untuk keperluan penataan jaringan jalan.
6. Untuk mengatasi permasalahan transportasi perkotaan, maka kebijakan utama diarahkan untuk membangun sistem transportasi massal dan umum yang efisien dan nyaman (bus kota, busway, monorail, subway) dengan mengurangi angkutan umum yang mengangkut penumpang dalam jumlah kecil (oplet) secara bertahap. Angkutan umum dengan penumpang sedikit ini secara bertahap dialihkan untuk melayani trayek pendek di luar pusat kota yang ditentukan.
7. Untuk mengurangi kemacetan dan permasalahan transportasi perkotaan, setelah upaya membangun sistem transportasi massal sebagai prioritas utama dilakukan, maka perlu dilakukan perbaikan alinyemen dan geometris jalan serta persimpangan; pembangunan jalan lingkar luar dan lingkar dalam kota, jalan alternatif, jalan layang dan jembatan layang; mempersiapkan dan membeli lahan-lahan baru untuk dijadikan jalur transportasi; serta memelihara jalan secara rutin dan berterusan. Mengingat kebutuhan jalan lingkar luar yang semakin mendesak untuk menghindari kepadatan arus lintas angkutan berat di dalam kota.
8. Menjadi prioritas utama pembangunan sistem drainase kota dan penanganan banjir yang komprehensif dengan memperhatikan tata ruang, topografi, drainase alam yang sudah ada, pembuatan waduk/ kolam penampung air, sumur resapan serta pemanfaatan daerah rawa dan gambut yang

terencana dengan memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan dan diharapkan tahun 2025 Kota Pekanbaru bebas banjir.

9. Penyediaan air bersih dilakukan dengan mengoptimalkan sistem pengolahan air bersih dari Sungai Siak dan perbaikan jaringan. Di bagian selatan kota diarahkan untuk pengolahan air sungai Kampar. Selain itu, pemanfaatan air tanah dalam (*aquifer*) yang memiliki cadangan yang cukup besar di utara Sungai Siak dilakukan dengan memperhatikan pemetaan air tanah, aspek lingkungan dan keseimbangan air tanah. Untuk konservasi air tanah dilakukan dengan membuat waduk dan sumur resapan.
10. Membantu memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi listrik dan bahan bakar, dengan menjalin kerjasama yang erat dengan instansi terkait baik pemerintah pusat maupun swasta sehingga tersedia energi listrik dan bahan bakar dalam jumlah yang cukup dan terjangkau.
11. Untuk menata utilitas kota supaya tidak semrawut maka harus dilakukan secara bertahap pembangunan utilitas kota yang meliputi instalasi listrik, energi/ gas, kabel komunikasi, jaringan air bersih, dan drainase secara terpadu dan terkoordinasi sehingga keamanan, kenyamanan, dan keindahan kota terwujud.
12. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal perlu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang ditunjang oleh sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang profesional.

### **C. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing**

Sumberdaya manusia yang berkualitas adalah kunci bagi maju dan makmurnya suatu bangsa. Daya saing yang tinggi

merupakan modal bagi masyarakat untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di masa depan. Untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, pembangunan Kota Pekanbaru jangka panjang diarahkan untuk:

1. Penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kewirausahaan dengan menyiapkan peserta didik dengan program pendidikan dan pelatihan melalui standar kompetensi global agar mampu bersaing dalam pasar bebas.
2. Meningkatkan mutu pendidikan, baik pada sekolah/ madrasah negeri maupun sekolah swasta dengan peningkatan sarana dan prasarana, kualitas guru, manajemen pendidikan, dan penataan kurikulum sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Memajukan pendidikan wirausaha dan politeknik sehingga mampu mendorong penumbuhan wirausaha baru untuk mengurangi tingkat pengangguran. Penerapan konsep *link and match* melalui kerja sama dengan dunia usaha dan industri sehingga kompetensi yang dimiliki oleh lulusan pendidikan sesuai dengan kebutuhan di dunia industri.
4. Pemerataan pendidikan dan pengurangan kesenjangan pelayanan pendidikan baik antara yang kaya dan miskin, pusat kota dan pinggiran, laki-laki dan perempuan, sekolah/ madrasah negeri dan swasta. Pemberian subsidi silang berupa biaya pendidikan dan beasiswa untuk masyarakat miskin, pinggiran, dan kaum perempuan diprioritaskan.
5. Memperbesar peluang memperoleh pendidikan melalui berbagai program yang murah dan terjangkau oleh masyarakat dengan kualitas yang memadai untuk mengurangi kesenjangan dalam memperoleh pendidikan.
6. Mengaktifkan perpustakaan umum dan menghidupkan kegiatan membaca di kalangan masyarakat dalam rangka mencerdaskan masyarakat luas.



7. Meningkatkan kesejahteraan guru atau pendidik, terutama mereka yang berada di daerah pinggiran kota.
8. Menyiapkan sistem informasi dan manajemen pendidikan modern untuk mengantisipasi perubahan dengan meningkatkan intensitas riset, pengkajian, sampai aplikasi program-program education development dalam jangka panjang.
9. Mempersiapkan program pembinaan khusus untuk pemuda sebagai tulang punggung masyarakat dan kemajuan bangsa.
10. Mendorong dunia usaha dan industri untuk menempatkan posisi tenaga kerja lokal yang berkompeten sebagai human capital yang diperlakukan secara manusiawi, melalui kemudahan persyaratan, perizinan, sewa dan perpajakan, jaminan keamanan dan kelangsungan berusaha kepada investor yang memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal dalam proses produksi, operasi dan pemasaran. Meningkatkan kualitas perlindungan ketenagakerjaan, kelembagaan, dan sarana hubungan industrial dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja.
11. Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dengan memprogramkan pendidikan, pelatihan yang terspesialisasi sesuai dengan latar belakang keilmuan dan berbagai keterampilan terapan. Membangun sarana-prasarana ketenagakerjaan, serta memanfaatkan balai-balai latihan ketrampilan dalam berbagai bidang untuk menyiapkan tenaga kerja bagi mengisi pasar kerja lokal, nasional dan internasional.

#### **D. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang berbudaya Melayu**

Sebagai Pusat Kebudayaan Melayu, maka Kota Pekanbaru harus melakukan upaya untuk mewujudkan

masyarakat yang berbudaya Melayu. Upaya untuk itu diarahkan melalui:

1. Memasyarakatkan budaya Melayu di tengah-tengah warga kota melalui pendidikan di sekolah/ madrasah; antara lain memasukkan pelajaran muatan lokal arab melayu untuk tingkat sekolah dasar, publikasi melalui penerbitan buku, media cetak, dan elektronik; penyelenggaraan acara budaya; dan aplikasi dalam arsitektur gedung dan taman kota. Penerapan budaya Melayu di tengah masyarakat harus memperhatikan adat yang bersendikan syarak, syarak bersendikan Kitabullah dimana Islam menjadi acuannya.
2. Memasyarakatkan nilai-nilai mulia yang terdapat dalam tunjuk ajar Melayu seperti jujur, amanah, sopan santun, kerja keras, cerdas, dan sifat mulia lainnya ke dalam setiap lapisan kehidupan, baik di masyarakat, pemerintahan, maupun dalam perdagangan dan aktivitas lainnya, sehingga budaya Melayu tidak hanya terwujud dalam simbol, tapi juga menjadi ruh dan motivasi dalam menjalankan pembangunan.
3. Menghidupkan semua sisi kebudayaan dalam budaya Melayu termasuk dalam hal etika (perilaku, nilai, dan norma), estetika (kesenian, tarian, pola gambar dan ukiran), ilmu pengetahuan (teknologi, arsitektur), sastra (bahasa, buku, puisi, sajak) dan aspek budaya lainnya.
4. Menyediakan anggaran yang proporsional untuk pembinaan, pengembangan, sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berbudaya Melayu.
5. Merevitalisasi obyek budaya, peninggalan bersejarah, karya seni dan produk budaya Melayu lainnya, sehingga bisa menjadi motivasi dan spirit dalam pembangunan.
6. Melestarikan benda-benda cagar budaya sebagai salah satu peninggalan sejarah masa lalu.

## **E. Mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.**

Masyarakat yang sejahtera adalah salah satu indikator dari majunya suatu bangsa. Kesejahteraan yang meningkat biasanya diiringi dengan meningkatnya kualitas SDM, demikian pula sebaliknya. Hal ini akan mempercepat majunya suatu bangsa.

1. Melakukan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan, terencana, terstruktur, dan terukur. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan melalui pendataan secara komprehensif; pemberian bantuan dan pemberdayaan masyarakat miskin; pendampingan; pembinaan mental dan spiritual; dan pemantauan perkembangan pengentasan kemiskinan secara terukur. Upaya ini dilakukan secara tuntas sehingga upaya pengentasan kemiskinan dapat membawa dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu sangat diperlukan kegiatan-kegiatan program penanggulangan kemiskinan sebagai instrumen untuk menurunkan angka kemiskinan.
2. Menciptakan dan membuka lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diiringi dengan peningkatan SDM tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar untuk menekan angka pengangguran kota.
3. Program dan kebijakan pembangunan kesehatan masyarakat, diarahkan kepada peningkatan kualitas hidup, perpanjangan harapan hidup, penurunan angka kematian ibu dan anak, pengaturan kelahiran, dan perencanaan keluarga sejahtera. Meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, baik dari kemudahan akses, biaya yang murah, dan pelayanan yang berkualitas. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, yang menjangkau sampai ke masyarakat miskin dan daerah pinggiran

yang jauh dari pusat kota yang dilengkapi dengan teknologi, tenaga medis serta pendistribusian obat secara merata; menata pelayanan kesehatan melalui penerapan manajemen kesehatan yang memadai.

4. Pembangunan di bidang kesehatan diprioritaskan melalui upaya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit dengan meningkatkan peran serta masyarakat. Pelayanan kesehatan difokuskan pada pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas), dan untuk masa yang akan datang perlu dibangun sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pekanbaru. Pemerintah harus berperan lebih banyak dalam mengatur kebijakan, pengawasan serta pengaturan sarana pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit pemerintah/ swasta, praktek dokter, bidan, apotik, dan pelayanan kesehatan lainnya. Terutama pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu melalui program-program bidang kesehatan.
5. Pembangunan di bidang olahraga diarahkan untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan masyarakat secara luas. Untuk itu dilakukan upaya melalui penyuluhan; pembangunan fasilitas olahraga yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas; pembangunan trotoar atau jalur khusus untuk pejalan kaki serta program pengembangan taman hutan kota yang dilengkapi sarana olahraga dan rekreasi bagi masyarakat kota.
6. Pembangunan hukum diselenggarakan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum. Hal ini dilakukan melalui peningkatan pemahaman dan peningkatan keahlian aparatur dalam bidang-bidang hukum. Meningkatkan kerjasama antara Pemerintahan Daerah dengan aparaturnya penegak hukum dari instansi vertikal seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan aparaturnya pengawasan. Dengan saling menghormati tugas dan kewenangan masing-masing, akan dapat dibangun saling pengertian dalam melaksanakan

tugas-tugas penegakan hukum dan penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Pekanbaru.

7. Mendorong kerukunan hidup berdampingan antar masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi melalui penyadaran perlunya harmonisasi, saling menghormati dan toleransi.
8. Pembangunan rehabilitasi sosial diarahkan untuk merevitalisasi sistem rehabilitasi untuk tujuan akhir kemandirian berusaha secara halal bagi gelandangan, pengemis, tunawisma, dan penyandang cacat serta PSK ; memberikan bantuan serta memotivasi dan merangsang masyarakat untuk dapat terlibat dalam menangani para jompo, anak yatim serta para penyandang penyakit kusta, **HIV/ AIDS**, dan orang gila.

#### **F. Mewujudkan Pekanbaru asri dan lestari.**

Kenyamanan, kebersihan, ketertiban, dan keindahan akan membawa suasana yang sehat dan mendukung aktivitas warga kota. Untuk itu perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan Pekanbaru yang asri dan lestari yang diarahkan pada usaha:

1. Menata ruang kota sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota Pekanbaru yang meliputi aspek perencanaan; pemberian izin pembangunan; pengawasan pembangunan; peruntukan dan perubahan bentuk dan fungsi bangunan dan lingkungan. Penataan ruang kota dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek lingkungan, keseimbangan alam, dengan melibatkan semua stake holder terkait sehingga tercipta suasana yang nyaman dan asri.
2. Pembangunan di pusat kota akan dikurangi dengan mengarahkan pembangunan untuk memajukan daerah pinggiran kota (luar pusat kota) yang masih tertinggal melalui penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum dan sosial, dan membuat faktor penarik untuk merangsang pembangunan di luar pusat

kota. Pemanfaatan lahan tidur diarahkan untuk usaha yang produktif dan arahan kebijakan untuk mengurangi kecenderungan masyarakat menelantarkan lahan tidur.

3. Pemanfaatan dan konservasi sumber daya air tanah dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan, dan ketersediaan cadangan air tanah dalam jangka panjang dengan melakukan pemetaan, pengawasan dan pengendalian.
4. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan serendah mungkin dengan membuat perangkat peraturan, audit lingkungan (geofisik, sosial, ekonomi, dan budaya), pembenahan institusi, dan penyadaran pada masyarakat dan sektor swasta. Penanganan polusi kendaraan bermotor diarahkan untuk menghidupkan transportasi massal yang efisien dan pembatasan jumlah kendaraan bermotor, terutama yang emisi gas buangnya buruk. Permasalahan polusi akibat industri diarahkan untuk memindahkan industri ke daerah Kawasan Industri Tenayan secara bertahap. Disamping itu perlu usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan dan hidup dalam suasana yang asri dan sehat.
5. Mengelola sampah kota secara terpadu mulai dari pengumpulan, pengangkutan, sampai pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir. Penggunaan teknologi yang tepat dan efektif harus dilakukan untuk mengelola sampah perkotaan yang besar jumlahnya dan singkat waktu pengelolaannya untuk menghindari penumpukan sampah yang menimbulkan penyakit. Prinsip **5R** untuk mendapatkan zero waste harus dilakukan secara bertahap yang meliputi recycle, reduce, reuse, recovery, dan revalue. Proses pemisahan dan daur ulang (recycling) untuk sampah plastik, kaca, kertas, dan sampah organik dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan pemerintah dan kesadaran masyarakat. Penyuluhan dan penyadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan mengelola sampah harus terus menerus dilakukan.

6. Penyediaan taman kota, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan tempat rekreasi dalam kota dilakukan dengan memanfaatkan tanah milik Pemerintah Daerah yang masih belum digunakan atau dengan membeli tanah milik masyarakat. Penghijauan dan penataan kompleks pekuburan bisa dilakukan untuk mendukung upaya ini. Penyediaan tanah ini harus memperhatikan aspek letak yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga pemanfaatannya bisa maksimal didapatkan oleh masyarakat. Jumlah ruang terbuka hijau, taman kota, dan rekreasi diarahkan minimal 30 % dari luas kota dengan penyebaran yang merata dan penataan yang asri.
7. Penataan pedagang kaki lima dan pedagang asongan dilakukan dengan menyediakan tempat-tempat khusus yang strategis dan mudah dijangkau, tetapi tidak mengganggu lalu lintas dan keindahan kota. Pengaturan waktu, tempat, izin, dan besar retribusi dilakukan atas dasar kepentingan bersama yang saling menguntungkan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pedagang.
8. Mengembangkan **water front city** di pinggiran sungai Siak dan menciptakan lingkungan asri di daerah pinggiran sungai, sehingga sungai berkembang menjadi daerah yang produktif dan bernilai ekonomis. Pengembangan kawasan **water front city** diarahkan untuk daerah wisata, pemukiman, dan perdagangan.

#### **G. Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa.**

1. Memajukan pendidikan agama dan keagamaan di sekolah, madrasah seta mewujudkan pembangunan Islamic Center Kota Pekanbaru untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman agama untuk membentuk akhlak mulia di dalam kehidupan sehari-hari.
2. Memajukan dan merangsang program pembinaan keagamaan pada semua lapisan masyarakat, aparatur pemerintah dan swasta.

3. Mengaplikasikan nilai keagamaan pada kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat maupun dalam menjalankan pemerintahan.
4. Memajukan kegiatan-kegiatan keagamaan, lembaga pendidikan agama dan keagamaan, serta institusi keagamaan dalam menjalankan dakwah dan bimbingan pada masyarakat.
5. Menangkal pengaruh negatif dari globalisasi dan teknologi informasi terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang tidak sesuai dengan akhlak dan ajaran agama.
6. Mempersiapkan perangkat hukum, pengawasan dan pembinaan, sehingga kehidupan masyarakat terlindungi dari pengaruh yang tidak baik.
7. Memajukan ekonomi syariah dengan mendukung program lembaga ekonomi umat seperti lembaga amil zakat, lembaga keuangan syariah, dan Perbankan syariah yang turut membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menggiatkan perekonomian masyarakat.
8. Menyediakan anggaran yang proporsional untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, khususnya bagi peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan, maupun sarana dan prasarana pendidikan agama dan keagamaan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang berisi visi, misi dan arah pembangunan Kota Pekanbaru merupakan pedoman bagi pemerintahan dan masyarakat didalam penyelenggaraan pembangunan daerah 20 tahun ke depan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 menjadi acuan bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). Keberhasilan pembangunan Kota Pekanbaru dalam mewujudkan visi Kota Pekanbaru, perlu didukung oleh (i) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (ii) konsistensi kebijakan pemerintah daerah; (iii) keberpihakan kepada rakyat; dan (iv) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

(2)

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19) ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
  4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
  7. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran negara Indonesia Nomor 4725) ;
  8. Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721) ;

(3)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Madya Pekanbaru Tahun 1994 Nomor 3 seri D Nomor 2) ;
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 13).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU**

**DAN**

**WALIKOTA PEKANBARU**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA PEKANBARU TAHUN 2005-2025

(4)

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekanbaru yang selanjutnya disebut RPJPD Kota Pekanbaru adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan daerah 20 tahun ke depan yaitu mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan, serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa, Tahun 2025 dalam Bentuk Rumusan Visi Misi dan arah Pembangunan Kota Pekanbaru.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Pekanbaru adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD Kota Pekanbaru serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1). Maksud Penyusunan RPJP Kota Pekanbaru adalah untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah didalam mewujudkan Visi, Misi dan Arah pembangunan yang di sepakati bersama serta menjadi acuan daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru.
- (2). Tujuan Pembangunan Daerah 20 ( dua puluh) tahun kedepan yaitu untuk mewujudkan Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan, serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa Tahun 2025.

(5)

### **BAB III SISTEMATIKA**

#### **Pasal 3**

- (1). RPJPD Kota Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2). RPJPD Kota Pekanbaru sebagaimana di maksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota Pekanbaru yang memuat visi, misi dan program Walikota.
- (3). Sistematika RPJPD Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

BAB III VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN

BAB IV PENUTUP

#### **Pasal 4**

- (1). Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Walikota yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Walikota berikutnya.
- (2). RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Walikota berikutnya.

#### **Pasal 5**

- (1). RPJPD Kota Pekanbaru sebagaimana di maksud dalam pasal 1 angka 4 menjadi acuan dalam penyusunan RPJM Kota Pekanbaru yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah Kota Pekanbaru.

(6)

- (2). RPJM Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memerhatikan RPJM Provinsi dan Nasional.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di : P e k a n b a r u  
pada tanggal : 8 Februari 2011

**WALIKOTA PEKANBARU,**

dto.

**H. HERMAN ABDULLAH**

Diundangkan di Pekanbaru,  
pada tanggal 10 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

dto.

**H. YUSMAN AMIN**

Pembina Utama Muda

Nip. 19530515 198303 1 006

**LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU**  
**TAHUN 2011 NOMOR 1**